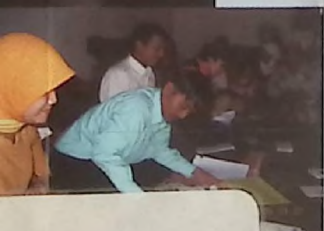
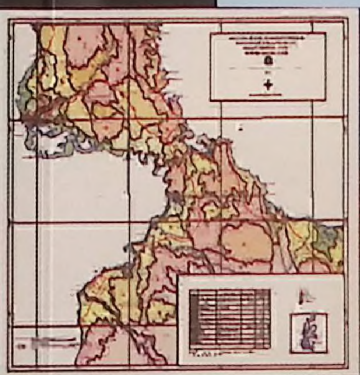




LAPORAN TAHUNAN 2006 BALAI BESAR PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN



006"



**BALAI BESAR PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
2007**





FEATI
631.17 "2006"
BAL
L

LAPORAN TAHUNAN 2006

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

Penanggungjawab : Muhrizal Sarwani

Tim Penyusun :
Ketua : Sudi Mardianto
Sekretaris : Ketut Kariyasa

Anggota : Erizal Jamal
Achmad Djauhari
Sumedi
Arivin Rivaie
Achmad Subaidi
Bekti Subagja
Restu Desi Djarwowati
Maesti Mardiharini
Achmad Saleh
Ari Murtiningsih
Yovita Anggita Dewi

Tgl. Terima : 11-2-2011
No. Induk : 1497/BBP2TP/2011
Asal Bahan Pustaka : ~~Balai Besar~~ / Hadiah
Dari : BBP2TP



Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
Alamat : Jalan Tentara Pelajar 10 Cimanggu Bogor 16114
No. Telp : (0251) 351277
Fax : (0251) 350928
Email : bp2tp@yahoo.com / bp2tp@litbang.deptan.go.id
http : www.bbp2tp.litbang.deptan.go.id



KATA PENGANTAR

Laporan Tahunan ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, dan mandat yang diberikan kepada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP) selama tahun 2006. Dengan demikian, laporan ini dapat digunakan sebagai acuan atau dasar pertimbangan dan referensi di masa yang akan datang, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi dalam upaya perbaikan kinerja ke depan.

Laporan Tahunan BBP2TP tahun 2006 berisi tentang: visi dan misi BBP2TP, program dan kegiatan, sumberdaya manusia, sarana prasarana, alokasi dan realisasi anggaran, evaluasi diri, serta intisari kegiatan koordinasi dan pengkajian. Sejak 1 (satu) tahun terbentuknya BBP2TP, tentunya telah banyak hal-hal yang dicapai. Namun demikian, dalam pelaksanaannya sudah tentu tidak luput dari berbagai tantangan, hambatan, dan kendala yang perlu mendapatkan perhatian bersama.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Tahunan ini diucapkan terima kasih. Harapan kami, laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan, khususnya dalam perbaikan kinerja BBP2TP ke depan.

Bogor, Januari 2007

Kepala Balai Besar Pengkajian
dan Pengembangan
Teknologi Pertanian,

Dr. Ir. Muhrizal Sarwani, MSc
NIP. 080 069 528



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Tugas dan Fungsi	1
1.2. Visi dan Misi	3
II. PROGRAM DAN KEGIATAN	5
2.1. Program	5
2.2. Kegiatan Koordinasi	6
2.3. Kegiatan Pengkajian	7
III. SUMBER DAYA MANUSIA	9
IV. SARANA DAN PRASARANA	16
4.1. Barang Tidak Bergerak	16
4.2. Barang Bergerak	17
V. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN	21
VI. EVALUASI DIRI KINERJA KEGIATAN BBP2TP TAHUN 2006	24
6.1. Hasil Evaluasi	24
6.1.1. Fungsi Koordinasi Program dan Evaluasi	24
6.1.2. Fungsi Koordinasi Administrasi Kepegawaian dan Aset	24
6.1.3. Fungsi Koordinasi Kegiatan Kerja Sama	25
6.1.4. Kegiatan Pengkajian.....	27
6.2. Permasalahan dan Upaya Pemecahan	27
VII. SINOPSIS HASIL KEGIATAN	29
7.1. Kegiatan Koordinasi	29
7.2. Kegiatan Pengkajian	52

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Kegiatan Koordinasi BBP2TP TA. 2006	7
Tabel 2.2. Kegiatan Pengkajian BBP2TP TA. 2006	8
Tabel 3.1. Keragaan Pegawai Lingkup BBP2TP Berdasarkan Golongan, 2006.....	10
Tabel 3.2. Keragaan Pegawai BBP2TP Berdasarkan Tingkat Pendidikan, 2006	10
Tabel 3.3. Jumlah Pegawai BBP2TP Berdasarkan Jabatan Fungsional Peneliti dan Penyuluh, 2006	11
Tabel 3.4. Keadaan Staf Fungsional Peneliti BBP2TP Berdasarkan Disiplin Ilmu, 2006	12
Tabel 3.5. Keragaan Pegawai Berdasarkan Kenaikan Pangkat, 2006	13
Tabel 3.6. Keragaan Pegawai Pensiun dan Mutasi, 2006	13
Tabel 3.7. Jumlah Tenaga Honorer BBP2TP, 2006	14
Tabel 3.8. Rekapitulasi Kenaikan Gaji Berkala Pegawai BBP2TP per 31 Desember 2006	14
Tabel 3.9. Rekapitulasi Cuti Tahunan Pegawai Lingkup BBP2TP Berdasarkan Golongan per 31 Desember 2006.....	15
Tabel 3.10. Rekapitulasi Pengurusan Kartu Pegawai BBP2TP Berdasarkan Golongan per 31 Desember 2006.....	15
Tabel 4.1. Rekapitulasi Barang Inventaris Tidak Bergerak BBP2TP, 2006.....	17
Tabel 4.2. Keadaan Barang Inventaris Bergerak Alat Angkutan, 2006 ...	18
Tabel 4.3. Rekapitulasi Barang Inventaris Bergerak Peralatan Kantor BBP2TP, 2006	18
Tabel 5.1. Realisasi Anggaran BBP2TP Tahun 2006 Berdasarkan Belanja, 2006	22

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Realisasi DIPA Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian T A. 2006	69
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	3
---	---

I. PENDAHULUAN

1.1. Tugas dan Fungsi

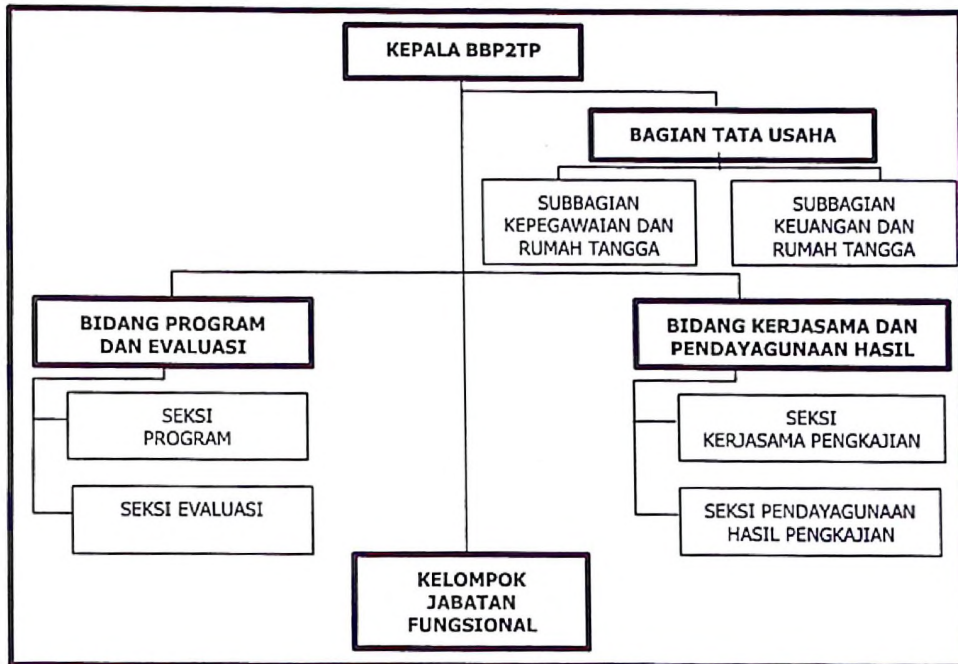
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 301/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP), tugas utama BBP2TP adalah melaksanakan pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian. Secara terinci, tugas pokok dan fungsinya, adalah: (a) Perumusan program dan evaluasi pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian, (b) Pelaksanaan kerjasama dan pendayagunaan hasil pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian, (c) Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan norma dan standar metodologi pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian, (d) Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan paket teknologi unggulan, (e) Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan model teknologi pertanian regional dan nasional, dan (f) Pengelolaan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar.

Disamping melaksanakan tugas pokok seperti yang diuraikan di atas, sesuai dengan keputusan Kepala Badan Litbang Pertanian No. 161/2006, BBP2TP diberi mandat untuk membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, dan perakitan teknologi spesifik lokasi yang dilakukan oleh BPTP, serta mempercepat pemasyarakatan inovasi teknologi yang telah dihasilkan oleh Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UK/UPT) lingkup Badan Litbang Pertanian. Pemberian mandat BBP2TP untuk melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap BPTP terkait erat dengan tekad Badan Litbang Pertanian untuk mengakselerasi pemasyarakatan inovasi teknologi pertanian yang telah dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian maupun lembaga penelitian dan pengembangan lain yang ada di Indonesia. Fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap

BPTP dilaksanakan BBP2TP dengan memanfaatkan jaringan penelitian dan pengembangan lingkup Badan Litbang Pertanian dan lembaga litbang lainnya. Selain itu, BBP2TP juga berperan dalam pembinaan pengembangan sumberdaya manusia (termasuk pembinaan karier struktural dan fungsionalnya) serta melakukan koordinasi dan pembinaan dalam publikasi hasil-hasil penelitian/pengkajian yang dihasilkan BPTP.

Karena rentang kendali koordinasi yang cukup besar inilah porsi terbesar (sekitar 80%) kegiatan BBP2TP adalah menjalankan fungsi koordinasi dan sisanya adalah melakukan kegiatan pengkajian dan upaya peningkatan diseminasi inovasi teknologi yang telah dihasilkan oleh Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Litbang Pertanian, termasuk BPTP. Luasnya rentang kendali dan cakupan kegiatan yang harus dikoordinasikan, maka dalam pelaksanaannya sehari-hari BBP2TP dibantu oleh dua Tim Teknis, yaitu Tim Teknis Pengembangan dan Tim Teknis Pusat Prima Tani, yang masing-masing ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Litbang Pertanian No. 12/Kpts/OT.160/J/1/2006 dan No. 221/Kpts/OT.160/J/10/2006.

Secara organisasi, struktur organisasi BBP2TP terdiri dari: a) Bidang Program dan Evaluasi, (b) Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Pengkajian, (c) Bagian Tata Usaha, dan (d) Kelompok Jabatan Fungsional (Gambar 1).



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

1.2. Visi dan Misi

Visi BBP2TP merupakan bagian integral dari visi pertanian dan pedesaan 2020; ruh, visi, dan misi pembangunan pertanian 2005 – 2009; serta visi dan misi Badan Litbang Pertanian 2005 – 2009 yang dirumuskan untuk menggali dan menyampaikan persepsi yang sama mengenai masa depan pembangunan pertanian dan pedesaan. Persepsi tersebut diwujudkan dalam bentuk komitmen jajaran BBP2TP untuk merealisasikan tujuannya. Oleh karena itu, visi Balai Besar Pengkajian bersifat futuristik sesuai dengan dinamika lingkungan strategis sehingga mampu menjadi salah satu akselerator pembangunan pertanian dan pedesaan. Berdasarkan hal tersebut, BBP2TP menetapkan **Visi** :

"menjadi institusi pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian nasional terkemuka yang mampu memberikan pelayanan prima dalam penyediaan dan fasilitasi informasi teknologi pertanian spesifik lokasi kepada berbagai pemangku kepentingan".

Misi BBP2TP merupakan pernyataan mengenai garis besar kiprah utama BBP2TP dalam mewujudkan visi di atas. Untuk itu, BBP2TP menetapkan **Misi** sebagai berikut :

1. Melaksanakan percepatan diseminasi kepada para pengguna serta meningkatkan penjangkauan umpan balik inovasi pertanian,
2. Melaksanakan pengkajian dan pengembangan model teknologi pertanian regional dan nasional,
3. Melaksanakan pengkajian dan pengembangan norma dan standar metodologi pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian,
4. Membangun jaringan kerja sama dan mendayagunakan hasil pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian, dan
5. Meningkatkan kapabilitas dan optimalisasi sumberdaya pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian.

II. PROGRAM DAN KEGIATAN

2.1. Program

Dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Badan Litbang Pertanian serta tugas, fungsi, mandat serta visi dan misi yang telah ditetapkan, BBP2TP menetapkan program utama sebagai berikut:

- (1) Program penelitian dan pengkajian teknologi spesifik lokasi,
- (2) Program pengembangan model agribisnis berbasis inovasi pertanian,
- (3) Program pengembangan kapasitas kelembagaan Litbang Pertanian, dan
- (4) Program pengembangan sumberdaya informasi, komunikasi, diseminasi, dan penjangkaran umpan balik iptek.

Penjabaran dari Program tersebut dituangkan ke dalam berbagai kegiatan. *Program 1*, dijabarkan dalam 5 kegiatan, yaitu: (a) Inventarisasi dan pengembangan sumberdaya pertanian spesifik lokasi, (b) Pengkajian teknologi inovatif spesifik lokasi dan agribisnis unggulan daerah, (c) Penelitian dan pengkajian berbasis kemitraan dan keperluan pembangunan pertanian spesifik lokasi berdasar permintaan, (d) Pengkajian informasi, komunikasi, diseminasi, dan penjangkaran umpan balik teknologi pertanian spesifik lokasi, dan (e) Penyediaan materi pelatihan, supervisi, dan koordinasi penyuluhan pertanian di daerah. *Program 2*, dijabarkan dalam 2 kegiatan, yaitu: (a) Pengembangan model agribisnis terintegrasi secara vertikal dan horizontal berbasis ekosistem dan (b) Pengembangan model agribisnis terintegrasi secara vertikal untuk komoditas dan produk pertanian bernilai komersial tinggi. *Program 3*, dijabarkan dalam 6 kegiatan, yaitu: (a) Pengembangan budaya kerja inovatif berorientasi bisnis, (b) Pengembangan sumberdaya Litbang yang meliputi SDM, sarana, dan prasarana, (c) Pengembangan standarisasi dan akreditasi lembaga dan

pranata Litbang, (d) Penyempurnaan sistem perencanaan, pendanaan, monitoring dan evaluasi, (e) Pemanfaatan jaringan kerja sama penelitian dan pengkajian, serta (f) Kaji tindak penanganan permasalahan mendesak serta kasus-kasus darurat nasional dan daerah. Sedangkan *Program 4*, dijabarkan dalam 4 kegiatan, yaitu: (a) Pengembangan materi dan sistem layanan perpustakaan iptek pertanian, (b) Peningkatan kapasitas penerbitan publikasi hasil penelitian dan pengembangan pertanian, (c) Pengembangan sistem informasi, komunikasi, diseminasi dan umpan balik inovasi pertanian, dan (d) Pengembangan sumberdaya fungsional dan sosialisasi pedoman, standar, dan norma keperpustakaan.

Berdasarkan klasifikasi kegiatan unggulan yang dilaksanakan oleh BBP2TP Tahun Anggaran 2006, maka kegiatan BBP2TP dikelompokkan dalam 2 kelompok kegiatan, yaitu kegiatan koordinasi dan kegiatan pengkajian.

2.2. Kegiatan Koordinasi

Dari program utama di atas, lebih lanjut dapat dikelompokkan menjadi kegiatan yang bersifat koordinasi dan kegiatan yang bersifat pengkajian. Sesuai mandat yang diberikan kepada BBP2TP berdasarkan SK Kaban No. 161/2006, maka porsi terbesar kegiatan difokuskan untuk menjalankan fungsi kegiatan koordinasi. Pada TA. 2006, kegiatan koordinasi BBP2TP dituangkan dalam sembilan kegiatan, yang meliputi: (1) Pendampingan, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Prima Tani, (2) Peningkatan Kapabilitas Pengkajian dan Diseminasi Teknologi Pertanian di BPTP, (3) Optimalisasi dan Pemanfaatan Sumberdaya BPTP, (4) Penyusunan Program, (5) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan, (6) Penyusunan Rencana Kerjasama, (7) Pengembangan Informasi, Komunikasi dan Diseminasi Teknologi Pertanian, (8) Pengembangan

Database dan Jaringan SIM dan SAP, dan (9) Administrasi Umum, Pengadaan, dan Pemeliharaan (Tabel 2. 1).

Tabel 2. 1. Kegiatan Koordinasi BBP2TP TA. 2006

NO	Judul Kegiatan	Lokasi	Pelaksana
1.	Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi, Pelaksanaan Prima Tani	Lokasi Prima Tani	▪ BBP2TP
2.	Optimalisasi dan Pemanfaatan Sumberdaya BPTP	▪ BBP2TP	▪ BBP2TP
3.	Peningkatan Kapabilitas Pengkajian dan Diseminasi Teknologi Pertanian di BPTP	▪ BBP2TP	▪ BBP2TP
4.	Penyusunan Program	▪ BBP2TP	▪ BBP2TP
5.	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	▪ BBP2TP	▪ BBP2TP
6.	Penyusunan Rencana Kerjasama	▪ BBP2TP	▪ BBP2TP
7.	Pengembangan Informasi, Komunikasi dan Diseminasi Teknologi Pertanian	▪ BBP2TP	▪ BBP2TP
8.	Pengembangan Database dan Jaringan SIM dan SAP	▪ BBP2TP	▪ BBP2TP
9.	Administrasi Umum, Pengadaan, dan Pemeliharaan	▪ BBP2TP	▪ BBP2TP

2.3. Kegiatan Pengkajian

Di samping menjalankan fungsi kegiatan koordinasi, BBP2TP juga melakukan kegiatan pengkajian. BBP2TP pada TA. 2006 melakukan lima kegiatan pengkajian, yaitu : (1) Kajian Peluang Pembangunan Pertanian di Kabupaten Merauke Papua, (2) Pengkajian Inovasi dan Diseminasi Program Prima Tani, (3) Pengkajian Dinamika Indikator Pembangunan Pedesaan di Wilayah Pengembangan Prima Tani, (4) Pengkajian Kelembagaan Petani Mendukung Program Prima Tani, dan (5) Analisis Kebijakan Pembangunan Pertanian (Tabel 2. 2).

Tabel 2. 2. Kegiatan Pengkajian BBP2TP TA. 2006

NO	Judul Kegiatan	Lokasi	Pelaksana
1.	Kajian Peluang Pembangunan Pertanian di Kabupaten Merauke Papua	Merauke, Papua	▪ BBP2TP
2.	Pengkajian Inovasi dan Diseminasi Program Prima Tani	5 Provinsi (Jabar, Sumbar, Sulsel, Bali, Kalbar)	▪ BBP2TP
3.	Pengkajian Dinamika Indikator Pembangunan Pedesaan di Wilayah Pengembangan Prima Tani	10 Provinsi (Sumut, Sumbar, Lampung, Jabar, Jateng, Jatim, Kalbar, Kalsel, Sulsel, NTB)	▪ BBP2TP
4.	Pengkajian Kelembagaan Petani Mendukung Program Prima Tani	5 Provinsi (DIY, Jatim, Sumsel, DKI Jakarta, NTB)	▪ BBP2TP
5.	Analisis Kebijakan Pembangunan Pertanian	▪ DIY ▪ Jateng	▪ BBP2TP ▪ BPTP DIY ▪ BPTP Jateng ▪ PSE-KP ▪ BB-SDLP

III. SUMBER DAYA MANUSIA

Mempertimbangkan tupoksi BBP2TP, diperlukan dukungan tenaga peneliti dan pengkaji serta tenaga administrasi untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik. Untuk itu, semaksimal mungkin BBP2TP memanfaatkan SDM yang ada di dalam lingkup Badan Litbang Pertanian, dengan persyaratan sudah pegawai negeri sipil dan sesuai dengan bidang/keahlian yang dibutuhkan.

Sumberdaya yang dimiliki BBP2TP memegang peran yang strategis dalam mendukung kinerja BBP2TP menuju institusi yang akuntabel, sehingga perlu diberdayakan secara optimal. Perencanaan, pembinaan, dan pengembangan SDM di BBP2TP yang berkualitas dan kegiatan pendukungnya akan memberikan dampak langsung dan tidak langsung terhadap perbaikan potensi, kinerja, dan dorongan untuk terus berprestasi dan mengembangkan diri. Keberhasilan pengembangan SDM ini pada akhirnya akan meningkatkan kinerja pelaksanaan program litkaji dan diseminasi, serta akuntabilitas institusi.

Total jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup BBP2TP tahun 2006 sebanyak 73 orang. Keragaan PNS di BBP2TP dapat dilihat dari beberapa kategori, antara lain: golongan, kenaikan pangkat, pensiun dan mutasi, tingkat pendidikan, jabatan fungsional, dan disiplin ilmu.

Berdasarkan golongan kepangkatan, PNS lingkup BBP2TP tahun 2006 terdiri dari pegawai golongan IV sebanyak 13 orang (17,81%), golongan III sebanyak 44 orang (60,27%), golongan II sebanyak 14 orang (19,18%), dan golongan I sebanyak 2 orang atau 2,74% (Tabel 3. 1).

Tabel 3. 1. Keragaan Pegawai Lingkup BBP2TP Berdasarkan Golongan, 2006

No.	Golongan	Jumlah Pegawai	Persentase (%)
1.	Golongan I	2	2,74
2.	Golongan II	14	19,18
3.	Golongan III	44	60,27
4.	Golongan IV	13	17,81
	Total	73	100

Berdasarkan tingkat pendidikan, nampak bahwa komposisi pegawai BBP2TP paling banyak berpendidikan S-1 yaitu sebanyak 22 orang (30,14%), diikuti SLTA sebanyak 20 orang (27,40%), S-2 sebanyak 17 orang (23,29%), S-3 sebanyak 5 orang (6,85%), D-3 sebanyak 4 orang (5,48%), kemudian SLTP sebanyak 3 orang (4,11%), dan terakhir berpendidikan SD sebanyak 2 orang atau 2,74% (Tabel 3. 2).

Tabel 3. 2. Keragaan Pegawai BBP2TP Berdasarkan Tingkat Pendidikan, 2006

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah pegawai	Persentase (%)
1.	Strata-3 (S-3)	5	6,85
2.	Strata-2 (S-2)	17	23,29
3.	Strata-1 (S-1)	22	30,14
4.	Diploma (D3)	4	5,48
5.	SLTA	20	27,40
6.	SLTP	3	4,11
7.	SD	2	2,74
	Total	73	100

Keragaan pegawai BBP2TP berdasarkan jenis jabatan fungsional baik peneliti maupun penyuluh, total sebanyak 25 orang (Tabel 3. 3). Jumlah

peneliti sebanyak 23 orang dan penyuluh sebanyak 2 orang. Untuk kelompok jabatan fungsional peneliti di BBP2TP, komposisi pada masing-masing jenjang fungsional relatif merata. Keragaan staf peneliti menurut jenjang fungsionalnya adalah sebagai berikut: Peneliti Utama sebanyak 5 orang (21,74%), Peneliti Madya sebanyak 4 orang (17,39%), Peneliti Muda sebanyak 7 orang (30,43%), Peneliti Pertama dan Peneliti Non Klas masing-masing sebanyak 1 orang (4,35%), dan 6 orang (26,09%). Sedangkan komposisi jabatan fungsional penyuluh hanya terdiri dari 2 orang yaitu Penyuluh Ahli Madya sebanyak 1 orang dan Penyuluh Ahli Muda sebanyak 1 orang.

Tabel 3. 3. Jumlah Pegawai BBP2TP Berdasarkan Jabatan Fungsional Peneliti dan Penyuluh, 2006

No.	Jenjang fungsional	Jumlah	Persentase (%)
A. Peneliti			
1.	Peneliti Utama	5	21,74
2.	Peneliti Madya	4	17,39
3.	Peneliti Muda	7	30,43
4.	Peneliti Pertama	1	4,35
5.	Peneliti Non Klas	6	26,09
Jumlah		23	100,00
B. Penyuluh			
1.	Penyuluh Ahli Utama	0	0,00
2.	Penyuluh Ahli Madya	1	50,00
3.	Penyuluh Ahli Muda	1	50,00
4.	Penyuluh Ahli Pertama	0	0,00
5.	Penyuluh Terampil Penyelia	0	0,00
6.	Penyuluh Terampil Pelaksana Lanjutan	0	0,00
7.	Penyuluh Terampil Pelaksana	0	0,00
8.	Penyuluh Non Klas	0	0
Jumlah		2	100,00

Berdasarkan disiplin ilmunya, komposisi kelompok jabatan fungsional peneliti BBP2TP sangat beragam, baik peneliti berlatar belakang budidaya

tanaman, peternakan, sosial ekonomi pertanian, maupun berlatar belakang pengolahan hasil. Berdasarkan latar belakang pendidikan, proporsi peneliti BBP2TP terbanyak adalah agronomi, sosial ekonomi pertanian, dan peternakan. Sementara peneliti dengan latar belakang pendidikan lainnya, jumlahnya relatif merata (Tabel 3. 4).

Tabel 3. 4. Keadaan Staf Fungsional Peneliti BBP2TP Berdasarkan Disiplin Ilmu, 2006

No.	Disiplin Ilmu	Pendidikan			Jumlah	Persentase (%)
		S3	S2	S1		
1.	Agronomi	2	2	1	5	20,00
2.	Peternakan	1	2	-	3	12,00
3.	Sosial Ekonomi	-	3	1	4	16,00
4.	Ekonomi Pertanian	1	3	-	4	16,00
5.	Teknologi Benih	1	-	-	1	4,00
6.	Biologi	-	-	1	1	4,00
7.	Ilmu Pertanian	-	1	-	1	4,00
8.	Manajemen	-	-	1	1	4,00
9.	Pengelolaan Sumber Daya	-	1	-	1	4,00
10.	Pasca Panen Hasil	-	-	1	1	4,00
11.	Penyuluhan & Komunikasi	-	-	1	1	4,00
12.	Teknologi Pertanian	-	-	2	2	8,00
	Jumlah	5	12	8	25	100,00

Keragaan pegawai berdasarkan kenaikan pangkat dalam periode April dan Oktober selama tahun 2006, menunjukkan bahwa kenaikan pangkat pegawai telah direalisasikan sebanyak 12 orang. Untuk periode April 2006, jumlah pegawai yang mengalami kenaikan pangkat sebanyak 8 orang terdiri dari 2 orang pegawai golongan II dan 6 orang pegawai golongan III. Sedangkan untuk periode Oktober 2006, jumlah pegawai yang mengalami kenaikan pangkat sebanyak 4 orang, terdiri dari 1 orang pegawai golongan II dan 3 orang pegawai golongan IV (Tabel 3. 5).

Tabel 3. 5. Keragaan Pegawai Berdasarkan Kenaikan Pangkat, 2006

Periode	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Jumlah Pegawai
1. Periode April 2006	-	2	6	-	8
2. Periode Oktober 2006	-	1	-	3	4
Total	0	3	6	3	12

Realisasi pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baru tahun 2006 sebanyak 5 orang, yang terdiri dari: 1 orang berpendidikan S-2, 2 orang berpendidikan S-1, dan 2 orang berpendidikan SLTA. Sedangkan jumlah pegawai yang berhenti karena pensiun dan mutasi selama periode tahun 2006 tercatat sebanyak 3 orang, yaitu 2 (dua) orang mutasi ke BPTP DKI Jakarta dan 1 (satu) orang mutasi ke Sekretariat Badan Litbang dari BBP2TP (Tabel 3. 6).

Tabel 3. 6. Keragaan Pegawai Pensiun dan Mutasi, 2006

Unit Kerja	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Jumlah Pegawai
BBP2TP Bogor	-	-	2	1	3
Total	0	0	2	1	3

Selain memiliki pegawai yang sudah berstatus PNS, BBP2TP juga didukung oleh tenaga honorer. Jumlah tenaga honorer lingkup BBP2TP per 31 Desember 2006 sebanyak 13 orang terdiri dari 5 orang berpendidikan S-1, 7 orang berpendidikan SLTA, dan 1 orang dengan pendidikan SD (Tabel 3. 7).

Tabel 3. 7. Jumlah Tenaga Honorer BBP2TP, 2006

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai	Persentase (%)
1.	S-1	5	38,46
2.	D-3	0	0
3.	SLTA	7	53,85
4.	SMP	0	0
5.	SD	1	7,69
	Total	13	100,00

Keragaan pegawai yang memperoleh Kenaikan Gaji Berkala selama tahun 2006 berjumlah 36 orang. Kenaikan gaji yang paling banyak adalah untuk golongan III, yaitu sebanyak 24 orang, kemudian golongan II sebanyak 7 orang, dan golongan IV sebanyak 5 orang (Tabel 3. 8).

Tabel 3. 8. Rekapitulasi Kenaikan Gaji Berkala Pegawai BBP2TP per 31 Desember 2006

No.	Bulan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Januari	-	-	-	-	-
2.	Februari	-	-	1	-	1
3.	Maret	-	2	6	2	10
4.	April	-	4	7	-	11
5.	Mei	-	-	2	-	2
6.	Juni	-	-	1	-	1
7.	Juli	-	-	-	-	-
8.	Agustus	-	1	2	1	4
9.	September	-	-	-	1	1
10.	Oktober	-	-	3	-	3
11.	Nopember	-	-	1	-	1
12.	Desember	-	-	1	1	2
	Jumlah	-	7	24	5	36

Jumlah Pegawai lingkup BBP2TP yang memanfaatkan Cuti Tahunan selama tahun 2006 sebanyak 5 orang, yang terdiri dari pegawai golongan

III sebanyak 4 orang dan pegawai golongan IV sebanyak 1 orang (Tabel 3. 9).

Tabel 3. 9. Rekapitulasi Cuti Tahunan Pegawai Lingkup BBP2TP Berdasarkan Golongan per 31 Desember 2006

No.	Golongan	Jumlah (orang)
1.	Golongan I	-
2.	Golongan II	-
3.	Golongan III	4
4.	Golongan IV	1
	Jumlah	5

Tahun 2006 tidak ada pegawai lingkup BBP2TP yang mengusulkan pengurusan kartu Asuransi Kesehatan (Askes). Sedangkan untuk pengurusan Kartu Istri (Karis) dan Kartu Suami (Karsu) selama tahun 2006 terdapat 2 orang, masing-masing untuk golongan III dan golongan IV (Tabel 3. 10).

Tabel 3. 10. Rekapitulasi Pengurusan Kartu Pegawai BBP2TP Berdasarkan Golongan per 31 Desember 2006

No.	Jenis Kartu	Golongan	Jumlah (orang)	Keterangan
1.	ASKES	I	-	
		II	-	
		III	-	
		IV	-	
2.	KARIS/KARSU	I	-	
		II	-	
		III	1	
		IV	1	
	JUMLAH		2	

IV. SARANA DAN PRASARANA

Dalam rangka keperluan pelaksanaan kegiatan operasional, BBP2TP memerlukan dukungan sarana dan prasarana (safas) yang memadai, baik dalam barang-barang tidak bergerak maupun barang-barang bergerak. Barang tidak bergerak meliputi: tanah dan bangunan gedung kantor, sedangkan barang bergerak meliputi: kendaraan, sarana komunikasi, peralatan kantor dan lain-lain. Dukungan safas yang memadai akan sangat menunjang kelancaran kegiatan pengkajian dan administrasi yang dilakukan BBP2TP. Pengadaan dan inventaris safas BBP2TP diperoleh dari pengadaan hibah dan pembelian melalui anggaran. Dalam pemanfaatan dan pengelolaannya, BBP2TP bertanggungjawab untuk mengelola inventaris kekayaan milik Negara (IKMN) tersebut.

4.1. Barang Tidak Bergerak

Barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan gedung kantor. Tahun 2006 BBP2TP menempati gedung kantor di Jalan Tentara Pelajar No.10 Bogor 16114, dengan kondisi sebagai berikut :

1. Luas tanah persil seluruhnya berjumlah 4.660 m², yang digunakan untuk halaman jalan/parkir dan penggunaan lain (taman/rumah kaca/garasi) serta bangunan perkantoran, dengan perincian pemanfaatan tanah sebagai berikut :
 - (a) Halaman jalan/parkir dan penggunaan lain: luas tanah 3.230 m²
 - (b) Bangunan perkantoran: luas tanah 576 m²
2. Barang inventaris tidak bergerak (bangunan perkantoran) yang ada di BBP2TP berasal dari eks Entomologi Balitbio dan pendanaannya dari berbagai sumber di Badan Litbang Pertanian, yaitu antara lain: Proyek

Banglab dan Proyek Peningkatan Pendapatan Petani Melalui Inovasi/P4MI (*Poor Farmers Income Improvement Through Innovation Project/FPI3P*). Rekapitulasi barang inventaris tidak bergerak (bangunan perkantoran) per 31 Desember 2006 disajikan pada Tabel 4. 1.

Tabel 4. 1. Rekapitulasi Barang Inventaris Tidak Bergerak BBP2TP, 2006

No.	Jenis	Jumlah
1.	Luas Tanah	4.660 m ²
2.	Luas Lantai Bangunan Kantor	576 m ² (560 m ²)
3	Halaman	1.735 m ²
4	Tempat Parkir dan jalan	1.495 m ²
5	Taman	347 m ²
6	Rumah Kaca	241 m ²
7	Bangunan Gudang	245 m ²
8	Garasi	21 m ²

4.2. Barang Bergerak

Keadaan inventaris barang bergerak dibedakan menjadi barang inventaris alat angkutan dan barang inventaris peralatan kantor.

1. Barang Inventaris Bergerak Alat Angkutan

Periode tahun 2006 mempunyai kendaraan roda-4 sebanyak 4 unit dan kendaraan roda-2 sebanyak 3 unit. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 4. 2. Sedangkan biaya pemeliharaan barang inventaris bergerak alat angkutan bermotor didapatkan dari anggaran rutin BBP2TP.

Tabel 4. 2. Keadaan Barang Inventaris Bergerak Alat Angkutan, 2006

No.		Jenis kendaraan	Jumlah
1.	Kendaraan Roda- 4	▪ Toyota Kijang Minibus	2 unit
		▪ Mitsubishi/Kuda	2 unit
2.	Kendaraan Roda- 2	▪ Suzuki A 100	2 unit
		▪ Yamaha Vega R	1 unit

2. Barang Inventaris Bergerak Peralatan Kantor

Barang inventaris bergerak peralatan kantor yang ada di BBP2TP terdiri dari 67 jenis barang, dimana jumlah masing-masing jenis barang bergerak sangat bervariasi. Barang inventaris tersebut bersumber dari anggaran Proyek ARMP II, PAATP, Banglab, dan anggaran Bagpro serta anggaran BBP2TP. Rekapitulasi barang inventaris bergerak peralatan kantor per 31 Desember 2006 disajikan pada Tabel 4. 3.

Tabel 4. 3. Rekapitulasi Barang Inventaris Bergerak Peralatan Kantor BBP2TP, 2006

No.	Jenis Barang Bergerak	Satuan	Jumlah
1	Portable Water Pump.	Unit	1
2	Kendaraan Roda 4 (Mini Bus 14 Orang ke bawah)	Unit	4
3	Sepeda Motor Roda 2	Unit	3
4	Grobak Dorong	Unit	1
5	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	Buah	1
6	Mesin Ketik Manual Langewagon (18 - 27 Inchi)	Buah	6
7	Mesin Hitung Elektronik/ Calculator	Buah	4
8	Lemari Besi Metal	Buah	7
9	Lemari Kayu	Buah	37
10	Filling cabinet Besi	Buah	26
11	Brankas	Buah	2
12	Peti Uang/ Cash Box	Buah	1
13	Kardek kayu	Buah	1
14	Buffet	Buah	2
15	Tabung Pemadam Api	Buah	4
16	Papan Visual	Buah	4

No.	Jenis Barang Bergerak	Satuan	Jumlah
17	White Board	Buah	8
18	Mesin Absensi	Buah	1
19	Overhead Projektor	Buah	1
20	LCD	Unit	2
21	Alat Pengaman/ Tralis (2 Unit Gedung)	Unit	2
22	White Board Electronic	Buah	1
23	Lampu Emergensi Lamp	Buah	5
24	Penyekat Ruangan	m2	32
25	Meja Kerja Kayu	Buah	112
26	Kursi Besi Metal	Buah	279
27	Kursi Kayu	Buah	7
28	Sice	Set	8
29	Meja Rapat	Buah	48
30	Meja Computer	Buah	3
31	Meja Telepon	Buah	1
32	Meja Resepsionis	Buah	1
33	Mesin Penghisap Debu	Buah	1
34	Mesin Potong Rumput	Buah	2
35	Lemari Es	Buah	1
36	AC. Split	Buah	23
37	Kipas Angin	Buah	1
38	Voice Recorder	Buah	5
39	Amplifier	Buah	1
40	Loudspeaker	Buah	4
45	Tustel	Buah	1
46	Tangga Almunium	Buah	1
47	Dispenser	Buah	8
48	Mimbar/podium	Buah	1
49	Handy Cam	Buah	1
50	Vertical Blind	M2	259
51	Cable Roll	Buah	3
52	Sun Screen	Buah	1
53	Audio Mixing Portable	Buah	1
54	Intercom Unit	Unit	17
55	Telephone (PABX)	Unit	1
56	Handy Talky (HT)	Unit	2

No.	Jenis Barang Bergerak	Satuan	Jumlah
57	Facsimile	Unit	1
58	Lokal Area Network (LAN)	Line	12
59	P.C. Unit	Unit	24
60	Lap Top	Unit	6
61	Ploppy Disk Unit	Unit	3
62	Printer	Unit	17
63	Scanner	Unit	2
64	External RW.	Unit	2
65	Server	Unit	1
66	Router	Unit	1
67	Netware Interface External	Unit	1

V. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

BBP2TP dalam melaksanakan tupoksinya sebagai unit pelaksana teknis di bidang pengkajian dan pengembangan, didukung oleh sumber dana yang berasal dari Dana APBN dalam bentuk Rupiah Murni (RM) serta Rupiah Murni Pendamping (RMP), untuk membiayai kegiatan Satker BBP2TP Bogor pada TA. 2006.

Adapun alokasi dan realisasi anggaran BBP2TP TA. 2006 adalah sebagai berikut: Anggaran Satker BBP2TP dicairkan sesuai dengan Surat Pengesahan DIPA TA. 2006 dari Departemen Keuangan Republik Indonesia dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: SP 248.0/18-09.0/XII/2006, tanggal 31 Desember 2005, dimana jumlah total PAGU DIPA TA. 2006 adalah sebesar Rp. 6.954.775.000. Namun kemudian, sesuai Surat Kepala BBP2TP Nomor: 371/KU.130/J.12/4/06 tanggal 5 April 2006, sebagian dana tersebut dialihkan ke BPTP Maluku Utara yaitu sebesar Rp 227.985.000 atau terjadi pengurangan anggaran di BBP2TP sehingga total anggaran yang dikelola oleh BBP2TP untuk tahun 2006 adalah sebesar Rp 6.726.790.000.

Alokasi anggaran BBP2TP berdasarkan jenis belanja (menurut DIPA tahun 2006) terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal (Tabel 5.1). Berdasarkan angka distribusinya, maka anggaran belanja yang paling besar adalah untuk belanja barang sebesar Rp 4.553 milyar (67,68%), kemudian untuk anggaran belanja pegawai sebesar Rp 1.875 milyar (27,89%), sedangkan anggaran belanja yang relatif paling kecil adalah untuk belanja modal sebesar Rp 297 juta (4,43%).

Realisasi belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana

Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Realisasi keuangan Satker BBP2TP sampai dengan akhir TA. 2006 mencapai Rp. 6.707.935.093 (99,72%) dari total anggaran yang dialokasikan dalam DIPA TA. 2006 (Tabel 5. 1).

Tabel 5. 1. Realisasi Anggaran BBP2TP Tahun 2006 Berdasarkan Belanja, 2006

Uraian	Pagu T.A 2006 (Rp)	Realisasi s/d Des 2006		Sisa Anggaran	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Belanja Pegawai	1.886.905.000	2.065.661.917	110,12	(189.759.917)	- 10,12
Belanja Barang	4.553.000.000	4.352.158.176	95,59	200.841.824	4,31
Belanja Modal	297.885.000	290.115.000	97,39	7.770.000	2,61
Total	6.726.790.000	6.707.935.093	99,72	18.854.907	0,28

Bila dilihat realisasi per jenis belanja, terlihat untuk belanja pegawai memiliki realisasi lebih dari 100 persen, yaitu sebesar Rp 2.065 milyar (110,12%), atau terjadi minus anggaran sebesar Rp 189 juta (10,12%). Terjadinya minus pada sisa anggaran belanja pegawai karena adanya beberapa faktor, seperti kenaikan pangkat dan kenaikan tunjangan sehingga pengeluaran belanja pegawai melebihi target pagu, juga disebabkan BBP2TP sebagai unit kerja baru mengalami mutasi pegawai baik karena perubahan pegawai lama maupun pegawai baru yang pindah dari unit kerja lain. Sedangkan untuk realisasi jenis belanja lainnya, kurang dari 100 persen. Pada belanja barang, realisasi mencapai 95,59% (Rp 4.352 juta) dengan sisa anggaran sebesar Rp 200 juta (4,31%), sedangkan belanja modal realisasinya lebih tinggi, yaitu 97,39% (Rp 290 juta) atau ada sisa anggaran sebesar Rp 7,77 juta (2,61%).

Total sisa anggaran untuk semua jenis belanja tahun 2006 adalah sebesar Rp 18,85 juta (0,28%). Hal ini terjadi karena adanya perubahan jadwal perjalanan dan terdapat pegawai yang berhenti dari PNS. Kelebihan

belanja perjalanan dan pembayaran gaji pokok PNS tersebut dikembalikan ke Kas Negara. Secara rinci realisasi anggaran Satker BBP2TP tahun anggaran 2006 disajikan pada Lampiran 1.

VI. EVALUASI DIRI KINERJA KEGIATAN BBP2TP TAHUN 2006

6.1. Hasil Evaluasi

6.1.1. Fungsi Koordinasi Program dan Evaluasi

Fungsi koordinasi administrasi program dan evaluasi secara umum telah berjalan dengan baik. Tahapan kegiatan penyusunan program pengkajian, baik untuk BBP2TP maupun BPTP, telah berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Badan Litbang Pertanian, sementara penajaman terhadap usulan kegiatan pengkajian BPTP untuk tahun 2007 dengan dibantu Tim Teknis Pengembangan juga telah dilaksanakan dengan baik. Untuk mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan pengkajian dan diseminasi, bersama dengan Tim Teknis Pengembangan telah disempurnakan Panduan Umum Pengkajian dan Diseminasi Inovasi Pertanian, Monitoring dan Evaluasi BPTP. Terkait dengan fungsi koordinasi kegiatan evaluasi, untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) telah berjalan dengan baik, namun untuk fungsi monitoring dan evaluasinya itu sendiri masih belum berjalan dengan optimal. Untuk itu, mulai awal tahun 2007 akan segera dilakukan perbaikan terhadap fungsi pelaksanaan monev, baik internal maupun BPTP, sehingga fungsi pengawasan melekat (waskat) dapat berjalan dengan baik.

6.1.2. Fungsi Koordinasi Administrasi Kepegawaian dan Aset

Luasnya rentang kendali dan banyaknya sumberdaya manusia yang harus dikelola (2.693 orang, dimana 596 diantaranya peneliti dan 262 penyuluh) membutuhkan strategi khusus untuk menanganinya. Hasil evaluasi menunjukkan koordinasi fungsi administrasi kepegawaian masih perlu dilakukan berbagai penyempurnaan, khususnya yang menyangkut kecepatan dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan administrasi

kepegawaian rutin, seperti kenaikan pangkat reguler dan fungsional, mutasi, serta pembenahan administrasi aset negara, khususnya kebun percobaan dan laboratorium. Upaya perbaikan fungsi pelayanan administrasi kepegawaian yang telah dilakukan dan akan terus dilakukan penyempurnaannya, antara lain: (a) Melakukan pembagian tugas staf kepegawaian berdasarkan wilayah, (b) Menambah dan meningkatkan ketrampilan staf kepegawaian, dan (c) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Biro Kepegawaian Departemen Pertanian, LIPI, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Sekretariat Negara. Terkait dengan pembenahan aset negara, upaya yang dilakukan adalah mendorong BPTP untuk segera melakukan pengamanan aset, khususnya lahan, melalui sertifikasi lahan dan pemagaran; sementara untuk laboratorium sedang dilakukan pembenahan terhadap kelengkapan peralatan dan upaya melikuidasi beberapa laboratorium BPTP yang tidak berfungsi secara optimal.

6.1.3. Fungsi Koordinasi Kegiatan Kerja Sama

Fungsi koordinasi kegiatan kerja sama pada tahun 2006 telah berjalan dengan baik. Disamping menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, baik dalam dan luar negeri, kegiatan kerja sama pada tahun 2006 difokuskan pada upaya pembenahan pelaksanaan kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh BPTP. Hasil evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh BPTP menunjukkan perlunya dilakukan penertiban tata cara pelaksanaan kegiatan kerja sama.

Beberapa kegiatan kerja sama dalam negeri yang telah dilaksanakan BBP2TP pada tahun 2006 antara lain: (a) Kegiatan magang mahasiswa jurusan Statistik IPB, (b) Bekerjasama dengan CRIAS *Language Centre* (CLC) dalam upaya peningkatan kemampuan berbahasa Inggris bagi staf

BBP2TP, dan (c) Bekerjasama dengan Sekretariat Badan Litbang Pertanian untuk mengadakan berbagai pelatihan, seperti ToT bagi Manajer Laboratorium Agribisnis dan Pemandu Teknologi, peningkatan kemampuan penyuluh, serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

Kegiatan kerja sama luar negeri yang dilaksanakan BBP2TP pada tahun 2006 antara lain: (a) *Rice Check Project*, kerja sama dengan *Food and Agriculture Organization* (FAO). Kegiatan ini dimulai pada Bulan Februari 2006 sampai dengan Desember 2009 dan dilaksanakan di 4 provinsi, yaitu di BPTP Sumatera Barat, Lampung, Banten dan Nusa Tenggara Barat, (b) *Smallholder Agribusiness Development Initiative* (SADI), merupakan kerja sama dengan ACIAR, dimulai pada Bulan Agustus 2006 sampai dengan Desember 2011. Kegiatan ini dilaksanakan di 4 provinsi, yaitu di BPTP Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, (c) *Implementation of Rodent Management in Intensive Irrigated Rice Production Systems in Indonesia and Vietnam*, merupakan kerja sama dengan CSIRO *Sustainable Ecosystems* (ACIAR), selama 3,5 tahun dimulai pada Bulan April 2006 sampai dengan September 2009. Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan peneliti dari BPTP Sulawesi Selatan dan BB Penelitian Padi, dan (d) *Farmer Empowerment Through Agricultural Technology and Information* (FEATI), merupakan kerja sama antara Badan Litbang Pertanian dengan World Bank, dirancang untuk dilaksanakan selama kurun waktu 5 tahun, yaitu periode 2007 – 2011, dilaksanakan di 18 provinsi (Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, DI.Yogyakarta, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara dan Gorontalo). BPTP ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan FEATI, yang dikoordinasikan oleh BBP2TP.

6.1.4. Kegiatan Pengkajian

Kegiatan pengkajian yang dilakukan BBP2TP pada tahun 2006, yaitu: (1) Pengkajian Inovasi dan Diseminasi Program Prima Tani, (2) Pengkajian Dinamika Indikator Pembangunan Pedesaan di Wilayah Pengembangan Prima Tani, (3) Pengkajian Kelembagaan Petani Mendukung Program Prima Tani, (4) Analisis Kebijakan Pembangunan Pertanian, dan (5) Kajian Peluang Pembangunan Pertanian di Kabupaten Merauke Papua. Kelima kegiatan tersebut secara umum telah dapat dilaksanakan dengan baik dan beberapa hasilnya, khususnya yang terkait dengan Analisis Kebijakan, telah dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan dalam menyusun program pembangunan pertanian. Disamping melaksanakan kegiatan pengkajian di atas, BBP2TP juga mendapat mandat sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan Prima Tani yang pada tahun 2006 dilaksanakan di 33 lokasi yang meliputi 25 provinsi. Hasil evaluasi menunjukkan pelaksanaan fungsi koordinasi kegiatan Prima Tani dapat berjalan dengan baik, selain karena dukungan dan kerja sama Tim Teknis Prima Tani yang sangat solid dengan BBP2TP, juga komitmen seluruh staf BBP2TP untuk menjalankan dengan baik tupoksi baru yang diembannya.

6.2. Permasalahan dan Upaya Pemecahan

Dari gambaran kinerja di atas, menunjukkan bahwa BBP2TP pada tahun 2006 secara umum telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, namun masih perlu dilakukan pembenahan dan optimalisasi kerjanya, khususnya yang menyangkut fungsi koordinasi. Beberapa permasalahan yang menyebabkan beberapa fungsi belum berjalan secara optimal antara lain: (a) Masih terbatasnya kemampuan staf penunjang untuk mendukung tupoksi BBP2TP yang cukup besar; (b) Masih

terbatasnya fasilitas pendukung (ruang kerja, komputer, perpustakaan); dan (c) Tahun 2006 merupakan masa transisi perubahan tupoksi dari Balai (eselon 3) menjadi Balai Besar (eselon 2), sehingga membutuhkan waktu untuk melakukan penyesuaian terhadap tupoksi yang baru. Namun demikian, beberapa permasalahan tersebut di atas sambil berjalan juga terus diupayakan pemecahannya. Beberapa upaya yang telah dilakukan dan akan terus berjalan, antara lain: (a) Penambahan staf baru hasil seleksi ujian umum dengan kualifikasi pendidikan yang cukup memadai; (b) Meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai pelatihan, baik jangka pendek maupun jangka panjang; (c) Peningkatan ketersediaan fasilitas pendukung, seperti komputer, ruang kerja, jaringan internet, dan perbaikan perpustakaan; dan (d) Masa transisi perubahan tupoksi cukup berjalan satu tahun saja, sehingga mulai tahun 2007 diharapkan semua fungsi pelayanan administrasi dapat berjalan optimal.

VII. SINOPSIS HASIL KEGIATAN

Penyajian hasil kegiatan utama dan penunjang penelitian dan pengkajian disajikan dalam bentuk sinopsis yang dikelompokkan berdasarkan kegiatan utama dan kegiatan penunjang BBP2TP.

7.1. Kegiatan Koordinasi

Seperti diungkap sebelumnya, ada sembilan kegiatan koordinasi yang dilakukan BBP2TP pada TA. 2006. Sinopsis dari sembilan kegiatan koordinasi tersebut, berturut-turut diinformasikan di bawah ini.

Pendampingan, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Prima Tani

Program Rintisan dan Akselerasi Pemasarakatan Inovasi Teknologi Pertanian (Prima Tani) adalah suatu model diseminasi teknologi yang dapat mempercepat penyampaian informasi dan penyebaran inovasi teknologi

pertanian serta umpan balik bagi penajaman penelitian dan pengembangan selanjutnya. Prima Tani diawali dengan penyusunan rancangan dasar dan pedoman umum pelaksanaan Prima Tani oleh Badan Litbang Pertanian pada tahun 2004, yang kemudian implementasinya dilaksanakan pada tahun 2005 di 14 provinsi yang meliputi 22 lokasi di 21 kabupaten. Pada tahun 2006, implementasi Prima Tani dikembangkan lagi di 11 provinsi, yang mencakup 11 lokasi di 11 kabupaten. Implementasi Prima Tani dilaksanakan terutama oleh masyarakat tani di pedesaan dengan berpedoman pada Rancan Bangun Lab Agribisnis yang dirumuskan berdasarkan hasil



Participatory Rural Appraisal (PRA). Keluaran akhir yang diharapkan adalah terbentuknya unit Agribisnis Industrial Pedesaan (AIP) dan Sistem Usahatani Intensifikasi dan diversifikasi (SUID) yang merupakan representatif industri pertanian dan usahatani berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi di suatu kawasan pengembangan.

Kegiatan Prima Tani yang telah dilaksanakan pada tahun 2006 secara garis besar meliputi: (a) Penyempurnaan organisasi pelaksanaan Prima Tani di pusat dan di daerah, (b) Sosialisasi dan koordinasi Prima Tani di pusat dan daerah, (c) Implementasi inovasi teknologi dan kelembagaan dalam Lab Agribisnis di 33 desa/lokasi, (d) Perbaikan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis PRA serta *Base Line Survey* Prima Tani, (e) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Prima Tani tahun 2005-2006, dan (f) Apresiasi, Workshop, dan pendampingan PRA sebagai persiapan implementasi Prima Tani 2007 di 168 lokasi.

Penyempurnaan organisasi pelaksana Prima Tani tingkat pusat dilakukan untuk menyesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab pembinaan Pada awal tahun 2006 bersamaan dengan adanya penambahan 11 lokasi Prima Tani yang baru, dilakukan perubahan struktur organisasi Prima Tani yang tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Litbang Pertanian Nomor 13/Kpts/OT.160/J/1/2006 tanggal 30 Januari 2006, tentang Tugas Pembinaan dan Tim Teknis Pusat Prima Tani. Menteri Pertanian mengeluarkan Keputusan nomor 496/Kpts/OT.160/9/2006 tanggal 5 September 2006 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Pelaksana Prima Tani. Menyesuaikan organisasi baru Prima Tani tingkat Departemen Pertanian, Kepala Badan Litbang Pertanian mengeluarkan Keputusan nomor 221/Kpts/OT.160/3/10/2006 tanggal 30 Oktober 2006 tentang Pembentukan Tim Penyelia dan Tim Teknis Pusat Prima Tani untuk menghindari kerancuan istilah pembina dalam organisasi Prima Tani Departemen Pertanian.

Sosialisasi tingkat Departemen Pertanian dilakukan untuk mendapatkan kesepahaman bersama dan persepsi yang sama atas konsep dasar Prima Tani, dilaksanakan di Solo, diikuti oleh para pejabat Eselon II dan Kabid Perencanaan lingkup Departemen Pertanian. Rumusan yang dihasilkan diantaranya, yaitu: Prima Tani sebagai salah satu instrumen Revitalisasi Pertanian, serta adanya komitmen dari Eselon I Departemen Pertanian untuk mendukung dan terlibat langsung dalam kegiatan Prima Tani. Sosialisasi tingkat daerah dilakukan di Provinsi dan Kabupaten, baik yang dilakukan oleh Penyelia, Tim Teknis Pusat maupun secara bersama-sama. Tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman Konsep Dasar Prima Tani agar tercapai kesepahaman, sinkronisasi, sinergisme dan koordinasi

tindakan dari semua jajaran pemerintah daerah. Dari sosialisasi ini diharapkan pula tersusun program pembangunan pertanian pedesaan di daerah yang terpadu, baik dalam hal teknis maupun pendanaannya. Dari sosialisasi yang dilakukan dapat disimpulkan pemerintah daerah dapat menerima Prima Tani untuk diterapkan sebagai penghela program pembangunan pertanian daerah yang ada. Respon tersebut ditindaklanjuti dengan menentukan lokasi Prima Tani dan mensinkronkan kegiatan yang ada di Dinas Teknis terkait sesuai dengan rancang bangun laboratorium lapangan agribisnis di daerah masing-masing. Selain sosialisasi konsep dasar Prima Tani, juga dilakukan sosialisasi hasil PRA dan rancang bangun agribisnis yang dilaksanakan pada wilayah terkait.

Dalam rangka mempertajam kegiatan yang ada serta menjabarkan tugas dan fungsi masing-masing pelaksana Prima Tani, dilakukan kegiatan koordinasi di Badan Litbang Pertanian dalam bentuk kunjungan kerja oleh Kepala Badan Litbang Pertanian maupun Penyelia ke daerah. Untuk meningkatkan pendampingan di lapangan, setiap Penyelia agar membentuk Tim Penyelia di unit kerjanya masing-masing dengan salah satu anggota berasal dari Tim Teknis. Selain itu, koordinasi juga dilakukan antara Badan Litbang dengan Badan Pengembangan SDM Pertanian, terkait dengan fungsi penyuluh dalam mendukung Prima Tani.

Monitoring dan Evaluasi (monev) telah dilakukan pada 14 provinsi Prima Tani tahun 2005 dan 9 provinsi Prima Tani tahun 2006. Kegiatan monev dilakukan secara berkelanjutan terutama pada setiap tahapan kritis proses implementasi dan pemberdayaan. Pelaksanaan monev tahun 2006 dilakukan melalui tahapan: (1) Penelusuran dokumen, (2) Diskusi dengan Kepala BPTP, penanggung jawab kegiatan, anggota tim pengkaji, dan institusi terkait, (3) Kunjungan lapangan untuk mengetahui kondisi yang terjadi di lapangan dan kemajuan kegiatan di lokasi Prima Tani, dan (4) Klarifikasi permasalahan yang dihadapi dan hasil rumusan dalam pelaksanaan Prima Tani di lapangan, sehingga terjadi titik temu dan alternatif pemecahannya.

Monev terhadap unsur perencanaan dilakukan terhadap kelengkapan penyusunan Rencana Penelitian Tim Peneliti (RPTP) dan Rencana Operasional Penelitian Pertanian (ROPP). Perencanaan yang dilakukan melalui penyusunan RPTP belum sepenuhnya memenuhi persyaratan administratif, karena kebijakan pendekatan Prima Tani banyak mengalami perubahan, sehingga penyusunan RPTP selalu berubah-ubah. PRA telah dilaksanakan oleh semua BPTP dengan intensitas yang berbeda, baik dari segi organisasi pelaksanaan maupun teknik pelaksanaannya. Kesulitan rekrutmen tenaga ahli menyebabkan sebagian Tim PRA tidak dapat

memenuhi komposisi disiplin/keahlian yang diperlukan. Tindak lanjut dari PRA adalah penyusunan Rancang Bangun Laboratorium Agribisnis. Dalam implementasinya, belum semua BPTP selesai menyusun Rancang Bangun Laboratorium Agribisnis dan perbaikan masih perlu dilakukan secara terus-menerus, karena perkembangan di lapangan dan adanya perbaikan-perbaikan panduan umumnya. Klinik Agribisnis telah terbentuk di desa laboratorium agribisnis, namun belum semua lengkap dan operasional sesuai dengan fungsinya.

Dalam rangka persiapan implementasi Prima Tani 2007, dilakukan Rapat Kerja "Persiapan Implementasi Prima Tani Tahun 2007" yang diikuti oleh Eselon II dan III lingkup Badan Litbang Pertanian dengan tujuan untuk: (1) Menyamakan persepsi tentang Prima Tani tahun 2007, (2) Mengetahui apresiasi implementasi Prima Tani tahun 2005 dan 2006 sebagai masukan implementasi tahun 2007, dan (3) Mematangkan persiapan implementasi Prima Tani tahun 2007 dengan fokus pada aspek manajemen. Dilakukan pula Workshop Evaluasi Perkembangan Prima Tani 2006 dan Rencana 2007 untuk mengevaluasi pelaksanaan Prima Tani 2006 dalam rangka meningkatkan kinerja implementasinya.

Dalam rangka tugas perbantuan sebagai manajer laboratorium agribisnis diperlukan penguasaan berbagai aspek teknis maupun aspek sosial ekonomi dan perencanaan. Tujuan penyelenggaraan apresiasi manajemen dan konsep Prima Tani untuk tenaga peneliti/penyuluh yang akan menjadi manajer laboratorium agribisnis adalah agar tenaga tersebut dapat menguasai prinsip dasar dan pedoman pelaksanaan Prima Tani serta berbagai aspek perencanaan dan pembangunan pertanian di daerah. Selain itu, dilakukan apresiasi perencanaan pembangunan pertanian daerah bagi tenaga pemandu teknologi mendukung Prima Tani untuk memberikan pembekalan bagi tenaga pemandu teknologi dalam menjalankan tugasnya.

Kegiatan pendampingan *Participatory Rural Appraisal (PRA)* dilakukan dalam rangka membantu tim BPTP dalam pelaksanaan PRA di lapangan agar hasil yang diperoleh dapat dipertajam dan sesuai yang diharapkan. Untuk lokasi Prima Tani 2006, seluruhnya dilakukan pendampingan PRA. Sedangkan untuk lokasi Prima Tani 2007, pendampingan dilakukan hanya pada BPTP yang dianggap baru (belum dilakukan Prima Tani).

Perkembangan introduksi inovasi teknologi khususnya pengembangan komoditas, masih dipengaruhi oleh komoditas yang ada yang biasa dilakukan oleh petani setempat. Untuk pengembangan inovasi kelembagaan, secara umum pengembangan kelembagaan internal (kelompok tani) yang telah dikembangkan di semua lokasi telah terjadi peningkatan fungsi maupun pelayanan terhadap anggota. Namun aktivitas

kelembagaan internal tersebut pada umumnya masih terbatas pada sarana produksi, belum banyak bergerak di subsistem agribisnis hilir.

Indikator keberhasilan Prima Tani diantaranya: (a) Mampu menyesuaikan dan menjamin kualitas produk pertanian yang dipasarkan seperti yang diinginkan oleh konsumen akhir (*quality assurance*), (b) Mampu mengadopsi teknologi pada seluruh fungsi atau proses transformasi produk pada alur vertikal, mulai dari usahatani hingga industri pengolahan (modernisasi). Indikasi keberhasilan tersebut dapat dilihat pada tingkat pendapatan rumah tangga petani dan dukungan pemerintah daerah. Dukungan Pemerintah Daerah yang diberikan dalam tahun 2005-2006 untuk memperlancar pelaksanaan Prima Tani adalah alokasi dana (*sharing*), peralatan, sarana produksi, dan bentuk fasilitas lainnya (gedung klinik agribisnis) mencapai lebih dari Rp 11,5 Milyar.

Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Prima Tani diantaranya belum tercapainya koordinasi internal dengan maksimal. BPTP sebagai pelaksana Prima Tani di lokasi masih menghadapi kesukaran berkomunikasi dengan Balit-balit penghasil atau sumber teknologi. Untuk mengatasi masalah-masalah yang ada, maka beberapa langkah-langkah antisipasi untuk peningkatan kinerja Prima Tani perlu dilakukan, diantaranya adalah: (i) Meningkatkan intensitas sosialisasi dan pendampingan, (ii) Membangun sistem informasi dan komunikasi misalnya dengan membangun milis dan koordinasi internal, dan (iii) Pemanfaatan tim pemandu teknologi serta penyelia.

Peningkatan Kapabilitas Pengkajian dan Diseminasi Teknologi Pertanian di BPTP

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP) dibentuk pada tahun 2005 sebagai upaya mendukung pencapaian visi dan misi BPTP. Secara operasional, BBP2TP berperan sebagai koordinator dan melakukan pembinaan terhadap BPTP. Visi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) adalah sebagai institusi yang mampu berperan dalam penyediaan teknologi spesifik lokasi untuk mendukung pembangunan pertanian wilayah yang berorientasi agribisnis. Sedangkan misi BPTP adalah: (1) Mendorong percepatan pembangunan pedesaan termasuk pertanian di wilayah dengan orientasi agribisnis melalui penyediaan paket teknologi pertanian spesifik lokasi dan (2) Mempercepat diseminasi atau alih teknologi kepada pengguna serta penyampaian umpan balik dari pengguna untuk penajaman program penelitian dan pengembangan pertanian.

Upaya pembinaan kepada BPTP sebelumnya diwujudkan dalam kegiatan asistensi dan diperoleh beberapa fenomena di BPTP diantaranya adalah sebagian besar BPTP masih memiliki kelemahan dalam melaksanakan penelitian dan pengkajian (Litkaji). Kelemahan-kelemahan tersebut, diantaranya adalah: (1) Belum dipahami dengan baik tentang alur program Litkaji mulai dari penelitian di kebun percobaan dan atau laboratorium, penelitian adaptif, penelitian sistem usaha tani (SUT), dan pengkajian sistem usaha pertanian (SUP) serta diseminasinya, (2) Belum dipahami perbedaan penelitian dengan pengkajian termasuk jenis penelitian, seperti penelitian dasar, penelitian strategis atau penelitian adaptif, (3) Masih lemahnya penguasaan metodologi Litkaji termasuk penerapan metode statistika di lapangan dan analisis data, (4) Sering terjadi tumpang tindih kegiatan Litkaji antara mandat BPTP dengan Balai Penelitian Komoditas, (5) Tidak sesuai Litkaji yang dilaksanakan dengan yang direncanakan misalnya judul Litkaji mengenai pengkajian SUP namun yang dilaksanakan hanya SUT atau bahkan hanya penelitian adaptif, (6) Aksesibilitas lokasi Litkaji relatif rendah, dan (7) Tingkat kesesuaian yang rendah antara pelaksanaan Litkaji dengan perencanaan yang tertulis di dalam proposal (RPTP/RDHP).



Hal ini kemungkinan disebabkan jumlah kegiatan yang besar tidak sebanding dengan sumberdaya manusia yang masih kurang di BPTP ditambah wawasan yang masih perlu ditingkatkan. Hasil pembinaan yang dilakukan selama ini ada kecenderungan jumlah program Litkaji dan diseminasi yang mengarah kepada adanya kesesuaian dengan jumlah sumberdaya (manusia) yang dimiliki. Kondisi ini menjadi dasar pertimbangan bahwa dalam proses menuju kemandirian BPTP di tingkat wilayah perlu dilakukan pembinaan yang terus menerus dan teratur, serta berkesinambungan dalam perencanaan pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan Litkaji.

Kegiatan peningkatan kapabilitas pengkajian dan diseminasi teknologi pertanian di BPTP bertujuan untuk: (1) Mendampingi dan mempertajam penyusunan matrik program Litkaji dan diseminasi BPTP yang disesuaikan dengan prioritas pembangunan pertanian wilayah dan mengacu pada tahapan pengkajian yang telah ditetapkan sebelumnya, (2) Mendampingi dan mempertajam penyusunan RPTP/RDHP Litkaji BPTP baik dari aspek ilmiah maupun dari aspek kesesuaiannya dengan kebutuhan *beneficiaries* dan prioritas program pembangunan pertanian wilayah, dan (3) Mendampingi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengkajian dan diseminasi .

Kegiatan ini terdiri atas tiga kegiatan utama, yaitu: (1) Pendampingan matrik program di semua BPTP, (2) Pendampingan RPTP/RDHP, (3) Pembahasan dan evaluasi RPTP/RDHP BPTP, dan (4) Peningkatan kapasitas SDM dalam melakukan pengkajian dan diseminasi.

Hasil kegiatan pendampingan penyusunan matrik program adalah matrik program yang lebih baik dan telah disepakati yang selanjutnya dituangkan ke dalam bentuk RPTP/RDHP. Penyusunan RPTP/RDHP dilakukan dengan mengacu kepada format yang telah baku di Badan Litbang Pertanian.

Selanjutnya dilakukan kegiatan pendampingan untuk menindaklanjuti pendampingan matrik program yang difokuskan pada penyusunan proposal litkaji dan diseminasi teknologi pertanian BPTP dalam bentuk RPTP/RDHP. Masing-masing tim pengkaji yang terlibat dalam kegiatan tersebut mendiskusikan proposal masing-masing yang telah disusun dengan pendamping yang dilanjutkan dengan perbaikan proposal tersebut. Pendampingan tahap ke dua dilakukan untuk menghasilkan proposal yang siap dinilai.

Evaluasi proposal yang dilaksanakan selain untuk menentukan kelayakan proposal-proposal tersebut, juga untuk menentukan jumlah anggarannya dilihat dari aspek apakah terlalu tinggi dan atau rendah dikaitkan dengan proposal yang bersangkutan. Kelayakannya terdiri atas tiga kategori, yaitu: layak tanpa perbaikan, layak dengan perbaikan ringan, dan belum layak.

Penyusunan matrik oleh masing-masing BPTP diawali dengan rapat koordinasi dalam rangka penajaman pelaksanaan kegiatan pengkajian tahun 2006 dan 2007. Setelah pelaksanaan rakor, pendampingan penyusunan matrik dilakukan secara lebih intensif kepada masing-masing BPTP. Dari rakor ini diperoleh rumusan utama yaitu : (1) Perlu pedoman penulisan judul/kegiatan dalam "Analisis Kebijakan" karena antar BPTP sangat beragam, baik yang bersifat responsif maupun antisipatif, (2) Perlu dibangun *data base* kegiatan pengkajian dan pengembangan yang telah

dilakukan BPTP diseluruh Indonesia. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari duplikasi pelaksanaan pengkajian dan pengembangan antar BPTP dan antar waktu, (3) Perlu perumusan metode pembinaan yang efektif untuk meningkatkan kapabilitas BPTP dan menghindari ketergantungan kepada Tim Teknis Pengembangan, (4) Perlu koordinasi antara perencanaan BB Pengkajian dengan bagian perencanaan Badan Litbang, antara lain untuk menghindari pembiayaan suatu RPTP yang dinilai tidak layak untuk dibiayai, (5) Panduan Peningkatan Kinerja Pengkajian dan Diseminasi Teknologi perlu disusun bersama dengan BPTP sehingga panduan tersebut sebagai milik bersama serta tanggung jawab bersama, dan (6) Iptek dan kelembagaan *indigenous* perlu diperhatikan dan disinergikan dengan teknologi hasil penelitian dalam perencanaan pengkajian dan diseminasi teknologi di daerah. Sinergisme antara teknologi dan kelembagaan *indigenous* dengan teknologi hasil penelitian telah memberikan dampak dan manfaat yang signifikan dalam diseminasi teknologi misalnya di Bali. Adapun tindak lanjut yang harus dilakukan adalah: (1) Proposal RPTP/RDHP 2007 perlu dilanjutkan pembahasannya yang lebih efektif agar mencapai *output* dan *outcome* yang lebih bermanfaat bagi calon pengguna. Untuk keperluan ini, maka dalam pelaksanaannya diperlukan komunikasi antara BPTP dengan BBP2TP, (2) BPTP perlu mensosialisasikan rencana kegiatan TA. 2006 dan 2007 di depan komisi teknologi di daerah masing-masing, (3) Untuk memandu dan mengarahkan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan BPTP perlu segera difinalkan penyusunan Renstra BPTP periode 2005-2009.

Pendampingan kepada BPTP dalam penyusunan matrik dilanjutkan dengan evaluasi matrik yang telah disusun BPTP berdasarkan hasil Rakor bulan sebelumnya. Evaluasi matrik dilakukan dengan mengumpulkan seluruh BPTP di Bogor pada bulan Maret 2006. Dalam pertemuan tersebut dibentuk 5 (lima) kelompok kerja yang terdiri dari 2 sampai 3 orang tim evaluator per pokja. Substansi matrik yang dievaluasi dibagi atas 3 program yaitu: (1) Pengembangan Agribisnis, (2) Ketahanan Pangan, dan (3) Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan.

Pendampingan penyusunan RPTP/RDHP dimaksudkan untuk melihat kesesuaian format dengan muatan isinya, konsistensi alur berpikir, ketajaman tujuan, kesesuaian output dengan kebutuhan dan ketajaman perumusan masalah. Pendampingan dalam penyusunan RPTP/RDHP dilakukan oleh Tim Teknis Pengembangan dan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi (BBP2TP).

Beberapa hasil pendampingan RPTP/RDHP tahun 2006 adalah: (1) 39 persen RPTP/RDHP Wilayah Timur Indonesia tidak lulus, (2) 61 persen

RPTP/RDHP seluruh Indonesia lulus namun dengan perbaikan-perbaikan. Beberapa penyebab ketidakkulusan matrik, adalah: tidak mengikuti pedoman/petunjuk yang telah disiapkan, kurang penguasaan masalah di tingkat petani, kurang memperhatikan hasil pengkajian/penelitian sebelumnya, RPTP/RDHP kadang-kadang merupakan payung kegiatan, aspek manajemen internal yang kurang mendukung dan sistem/metoda pendampingan yang kurang sesuai dengan kondisi BPTP.

Dari kelemahan tersebut di atas, maka untuk waktu yang akan datang disarankan beberapa hal, yaitu: (1) Peningkatan keterlibatan Tim Pendamping (perencanaan, matriks kegiatan dan seminar), (2) Panduan penyusunan proposal (RPTP/RDHP) yang baku (disusun bersama), (3) Klastering pembinaan & pendampingan, (4) Membentuk Tim Evaluator/Pembinaan Internal, dan (5) Tim Pendamping memiliki wewenang yang jelas.

Optimalisasi dan Pemanfaatan Sumberdaya BPTP

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) adalah unit pelaksana teknis di bidang penelitian dan pengembangan pertanian yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP). Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan dan mengoptimalkan sumberdaya BPTP, BBP2TP pada tahun 2006 melaksanakan beberapa kegiatan yang meliputi Bidang Kelembagaan, Bidang Manajemen SDM, Workshop/Pertemuan Regional, Sosialisasi Permentan BPTP, Identifikasi laboratorium dan inisiasi perumusan pemanfaatan kebun percobaan dengan tujuan untuk membina dan mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki oleh BPTP.

Dalam Bidang Kelembagaan, upaya peningkatan status Satker Gorontalo, Maluku Utara dan inisiasi Irian Jaya Barat untuk menjadi lembaga pengkajian di tingkat provinsi (Setingkat BPTP lainnya) telah ditempuh melalui kerja sama antara Lembaga pemberi kebijakan (Menpan), Biro Organisasi dan Kepegawaian Deptan, pemerintah daerah dan masyarakat. Berdasarkan kebutuhan pemerintah daerah terhadap lembaga pengkajian pertanian seperti BPTP, peningkatan status Satker menjadi BPTP dapat diwujudkan. Unsur organisasi seperti kesiapan fasilitas kantor, fasilitas penelitian dan sumberdaya manusia telah memenuhi persyaratan untuk menjadi suatu lembaga pengkajian di tingkat provinsi. Melalui proses yang cukup panjang, maka terbentuklah secara formal BPTP dan BPTP Maluku

Utara, sedangkan untuk satker sementara Irian Jaya Barat belum memenuhi persyaratan dan akan dilanjutkan.

Dalam kegiatan manajemen, penataan manajemen sumberdaya manusia dalam bidang pelayanan kepegawaian yang meliputi Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, Mutasi Pegawai, Administrasi jabatan fungsional (Peneliti, Penyuluh, Litkayasa dan lain sebagainya) merupakan tiga hal yang perlu menjadi perhatian. Pada implementasinya, penataan dan peningkatan layanan dalam administrasi kepegawaian pada tahun 2006 menghasilkan pelayanan yang lebih baik yang ditunjukkan dengan semakin singkatnya jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proses kepegawaian sesuai dengan aturan yang berlaku. Mekanisme penilaian angka kredit yang semakin efisien dan berkurangnya pelanggaran disiplin pegawai yang mengakibatkan TGR dan atau pengenaan sanksi secara signifikan menunjukkan bahwa sosialisasi dan pembinaan sumberdaya BPTP masih sangat diperlukan.

Salah satu bentuk pembinaan dan sosialisasi yang dilakukan BBP2TP diimplementasikan dalam pertemuan regional di 4 (empat) tempat yaitu Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, dan Pekanbaru-Riau. Dalam Bidang SDM, materi pertemuan dititikberatkan pada berbagai isu perkembangan dan kebijakan penyuluh baik di tingkat pusat maupun di BPTP. Mekanisme penilaian angka kredit, prosedur administrasi dan diskusi permasalahan-permasalahan seputar penyuluh adalah topik yang disampaikan oleh narasumber dalam kegiatan ini. Selain itu sosialisasi Permentan BPTP untuk penyempurnaan tupoksi penyuluh di BPTP dilaksanakan secara bertahap di beberapa BPTP. Diharapkan dengan terlaksananya sosialisasi penyempurnaan tupoksi penyuluh di BPTP dapat memberikan informasi terbaru dan memberikan motivasi terhadap para penyuluh di BPTP.

Optimalisasi pemanfaatan laboratorium di BPTP diawali dengan menyusun dan menata kembali unsur-unsur penting dalam pengelolaan kebun percobaan dan laboratorium, yang meliputi: sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, dan efektivitas manajemen pengelolaan kebun percobaan atau laboratorium itu sendiri. Penataan dimulai dengan menginventarisasi dan mengidentifikasi pemanfaatan kebun percobaan dan laboratorium. Disamping itu peninjauan dan pengamatan secara langsung ke beberapa BPTP memberikan gambaran pemanfaatan kebun percobaan dan laboratorium yang sesungguhnya. Pemanfaatan kebun percobaan dan laboratorium di BPTP pada implementasinya masih perlu penataan dan pemberdayaan. Pembinaan terhadap manajemen pengelolaan kebun

percobaan dan laboratorium masih sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas kebun percobaan dan laboratorium itu sendiri.

Pelaksanaan kegiatan optimalisasi dan pemanfaatan sumberdaya BPTP berjalan cukup baik dan tidak menemui kendala yang cukup berarti. Perencanaan kegiatan, pelaksanaan dan sasaran kegiatan dapat tercapai dengan baik. Secara teknis pengelolaan manajemen sumberdaya dan pemanfaatan SDM, fasilitas, dan sarana masih memerlukan penataan manajemen yang lebih efektif, sehingga pemanfaatan sumberdaya BPTP menjadi lebih optimal. Selain itu, peningkatan kompetensi pegawai dan alternatif pemecahan permasalahan-permasalahan yang timbul baik dalam bidang kepegawaian atau bidang lainnya, menjadi acuan BPTP untuk lebih meningkatkan kapasitas dan kualitas pegawai di BPTP.

Penyusunan Program

Perencanaan memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan konsep anggaran berbasis kinerja. Program/kegiatan yang disusun harus mampu menunjukkan output yang hendak dicapai dan bagaimana setiap anggaran dialokasikan untuk mencapai sasaran tersebut. Dalam menyusun perencanaan/program harus memperhatikan berbagai faktor antara lain sumber daya (dana, SDM, dan sarana yang ada).

Perencanaan program/kegiatan diwujudkan dalam bentuk matrik program dari suatu UK/UPT yang menggambarkan secara rinci latar belakang program/kegiatan, input, output dan sasaran dalam jangka waktu tertentu. Matrik tersebut dijabarkan secara lebih rinci dalam rencana kerja, Rencana Pengkajian Tim Pengkaji/Rencana Diseminasi Hasil Pengkajian (RPTP/RDHP), dan Rencana Operasional Pelaksanaan Pengkajian/Rencana Operasional Diseminasi Hasil Pengkajian (ROPP/RODHP) yang substansinya meliputi perkiraan dampak hasil yang telah dicapai, keluaran akhir, keluaran tahunan, dan usulan kebutuhan biaya.

Tujuan kegiatan penyusunan program tahun 2006 adalah untuk: (1) Mengkoordinir penyusunan matrik program BPTP dan BBP2TP TA. 2007, (2) Mengkompilasi matrik program BPTP dan BBP2TP TA. 2007 hasil pembahasan, (3) Menyusun dan mengkoordinir, serta menganalisis kebutuhan anggaran BPTP dan BBP2TP TA. 2007, dan (4) Mendampingi pembahasan dan mengkompilasi penyusunan RKA-KL BPTP TA. 2007.

Kegiatan utama yang dilakukan dalam penyusunan program sejalan dengan tahapan perencanaan program, yaitu: (1) Penyusunan matrik

program, (2) Kompilasi matrik program, (3) Analisis kebutuhan anggaran setiap program, dan (4) Penyusunan RKA-KL.

Penyusunan matrik program BPTP maupun matrik program BBP2TP merupakan salah satu tahap awal perencanaan suatu kegiatan. Penyusunan matrik program ini mempertimbangkan dampak kegiatan tersebut, input, maupun output yang akan dihasilkan. Seluruh program yang disusun disesuaikan dengan ketersediaan sarana dan prasarana, SDM, serta anggaran.

Sebelum penyusunan program, dilakukan koordinasi intern BPTP dan rapat koordinasi seluruh unit kerja di bawah Badan Litbang Pertanian yaitu koordinasi dengan Puslit/Pusat, Balai Besar, dan Balai/Balit. Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan penajaman program-program utama yang diprioritaskan oleh Badan Litbang serta sosialisasi kebijakan-kebijakan pendukung yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan matrik program.

Tahap selanjutnya adalah pembahasan program/kegiatan merupakan kegiatan yang menentukan dari seluruh tahap rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan. Pembahasan matrik program dimulai dari tingkat kelompok pengkaji di BPTP dan pembahasan dilanjutkan oleh Tim Teknis Pengembangan BBP2TP. Fokus pembahasan adalah tingkat kepentingan permasalahan pengkajian, sinkronisasi kegiatan dengan kebutuhan pengguna, kesesuaian substansi dengan cakupan kegiatan pada selang waktu tertentu dan kesesuaian penyusunan matrik dengan format standar yang disusun Badan Litbang.

Koordinasi dan analisis kebutuhan anggaran diutamakan untuk melihat rasionalitas jumlah biaya yang dicantumkan dalam program dengan rambu-rambu pembiayaan sesuai kebijakan Badan Litbang Pertanian. Analisis kebutuhan anggaran mempertimbangkan satuan-3 yang merupakan pagu indikatif dari Departemen Pertanian yang telah disetujui DPR, dan dikeluarkan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran Perimbangan dan Keuangan, melalui Badan Litbang Pertanian.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) merupakan rincian anggaran setiap kegiatan sesuai program utama Badan Litbang Pertanian. RKA-KL disusun menurut unit organisasi dan kegiatan, berdasarkan rencana kerja Kementerian Negara/Lembaga yang telah disesuaikan dengan pagu sementara yang ditetapkan Menteri Keuangan. Penyusunan RKA-KL dilakukan dengan menggunakan pendekatan Penganggaran Terpadu, Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dan Penganggaran Berbasis Kinerja.

RKA-KL yang telah disusun harus dilengkapi dengan dokumen berupa data dukung administrasi berupa TOR (RPTP/RDHP) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB) yang lengkap dan akurat, khususnya dari kewajaran satuan biaya pengeluaran serta keluaran yang dihasilkan. Pembahasan pendanaan serta materi teknis dan non teknis dilakukan di Direktorat Jenderal Anggaran Perimbangan dan Keuangan di Departemen Keuangan, Jakarta, dan selanjutnya penelaahan antara kesesuaian SRAA dan DIPA dilakukan di Kantor Wilayah XII Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bandung.

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Tiga komponen penting dalam monitoring dan evaluasi, yaitu *input*, proses dan *output*. *Input* merupakan kegiatan perencanaan penelitian dan sangat menentukan arah dan tujuan Litkaji. Proses litkaji adalah tahap lanjutan yang meliputi kegiatan litkaji di lapangan maupun studi pustaka dan analisis data. Dari pelaksanaan kegiatan di lapangan dan dengan menganalisis data secara komprehensif, maka dibuatlah laporan sebagai tahap akhir kegiatan monev. Agar tercipta kesesuaian antara *input*, proses, dan *output* perlu dirancang metode pelaksanaan Monev yang baik, agar tujuan pelaksanaan Monev dapat tercapai. Monev dilakukan mulai dari monev tahap awal, tahap pelaksanaan kegiatan dan tahap akhir.

BBP2TP sebagai lembaga internal dan eksternal mempunyai tugas sebagai koordinator untuk kegiatan di BPTP seluruh Indonesia dan melakukan koordinasi dengan institusi lain yang ada di Badan Litbang Pertanian serta melakukan koordinasi dengan aktivitas yang dilakukan oleh bidang-bidang terkait di BBP2TP.

Tujuan kegiatan monev adalah menyusun panduan monev kinerja BBP2TP dan BPTP, melakukan sosialisasi panduan monev, simonev, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), melakukan monev kinerja BBP2TP dan BPTP, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kajian, menyusun laporan bulanan untuk bahan Rapat Pimpinan (Rapim), laporan tahunan pelaksanaan kinerja BBP2TP dan LAKIP BBP2TP dan rekapitulasi LAKIP BPTP yang nantinya akan dihasilkan suatu laporan dari tiap-tiap kegiatan tersebut.

Materi monev perencanaan kegiatan, meliputi kelengkapan dan kesesuaian RPTP, RDHP dan ROPP/RPPK tahun berjalan beserta rencana operasional Pelaksanaannya (anggaran dan Teknis). Monev hasil kerja, meliputi kelengkapan dan kesesuaian dokumen laporan akhir serta realitas pencapaian sasaran akhir terutama output pada tahun berjalan. Bila monev

dilakukan pada tahun terakhir dari kegiatan diseminasi, maka hasil (*outcome*) dan manfaat (*benefit*) perlu dievaluasi.

Lima kegiatan utama monev tahun 2006 yaitu penyusunan laporan rekapitulasi dan kompilasi data pelaporan yang meliputi a) Rekapitulasi LAKIP BPTP/PTP Tahun Anggaran 2005, b) LAKIP BBP2TP Tahun Anggaran 2005, c) Laporan Tahunan BBP2TP Tahun Anggaran 2005, d) Laporan Bulanan Simonev dan Bahan Rapim Tahun 2006. Selain itu, juga membuat laporan dari berbagai even pertemuan seperti Apresiasi SAI di Yogyakarta dan Apresiasi SIMPEG di Surabaya.

Secara kumulatif sistem pelaporan yang berjalan hingga saat ini, baru meliputi laporan hasil pengkajian, laporan tahunan, LAKIP, laporan Simonev serta laporan kegiatan unggulan yang secara berkala diterima di BB-Pengkajian. Berdasarkan substansi dan model pelaporan tersebut, secara umum cukup beragam baik dalam penyajian maupun penampilan, sehingga tidak jarang menyulitkan dalam proses kompilasi pada saat diperlukan untuk informasi pendukung pelaporan ke Badan Litbang Pertanian.

Jumlah LAKIP TA. 2005 yang tercatat dan terdokumentasi di BB-Pengkajian sebanyak 27 BPTP (87,10%) dari total 31 BPTP. Laporan yang diterima belum memenuhi format LAKIP sesuai pedoman Lembaga Administrasi Negara (Keputusan Kepala LAN Nomor 230/IX/6/8/2003, Tentang Pedoman Penyusunan LAKIP). Hal ini disebabkan belum tersosialisasinya format LAKIP dan petugas penyusun LAKIP merupakan tenaga baru yang belum pernah mengikuti pelatihan LAKIP.

Laporan Akhir per Kegiatan TA. 2005 merupakan laporan utama kegiatan teknis yang harus dilaporkan pada bulan Januari setiap tahun. Laporan ini sebagai bukti dokumen pertanggungjawaban realisasi DIPA dan dipilih secara selektif sebagai bahan evaluasi kebijakan yang dituangkan dalam laporan bulanan (bahan materi Rapim Badan Litbang Pertanian). Laporan kegiatan unggulan BPTP TA. 2005 baru mencapai 90,32% dari 28 BPTP dan telah dijadikan bahan materi Rapim. Laporan SIMONEV BPTP belum secara rutin disampaikan sehingga diharapkan laporan tersebut sudah diterima selambat-lambatnya minggu pertama setiap bulannya.

Laporan Monev Kegiatan Teknis Intern BPTP, dijadikan sebagai bahan acuan untuk menentukan BPTP yang akan dijadikan contoh kegiatan monev oleh BB-Pengkajian. Berdasarkan hasil verifikasi, beberapa laporan monev internal BPTP sudah ada yang disampaikan ke BBP2TP. Namun demikian, hampir sebagian besar BPTP sudah melakukan monev internal terkait dengan kegiatan teknis intern di BPTP masing-masing.

Verifikasi Laporan Tahunan TA. 2005 yang tercatat, dari sebanyak 17 BPTP (54,84%) telah mengirimkan laporan tahunan TA. 2005, sedangkan 14 BPTP lainnya belum menyampaikan laporan tahunan TA. 2005 ke BB-Pengkajian hingga Desember 2006.

Kegiatan monev litkaji dan administrasi yang baru dilaksanakan, adalah kegiatan monev perencanaan kegiatan (*ex-ante evaluation*), Dokumen perencanaan meliputi Rencana Strategik, Matrik Program, RPTP, dan beberapa dokumen pendukung, seperti SK Pelaksana, ROPP, hasil evaluasi proposal (Form 1), pengesahan proposal penelitian/kegiatan operasional (Form 2), persetujuan perjalanan dinas untuk pengumpulan data penelitian/kegiatan (Form 3), pengajuan izin ke lapangan (Form 4), laporan perjalanan dinas (Form 6) serta laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan (Form 7), dengan proses evaluasi yang terstruktur melalui mekanisme antar Bidang Program dan Evaluasi, Kepala Balai selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta Bendahara dan Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Evaluasi kesesuaian perencanaan pengkajian dan permasalahan yang ingin dipecahkan ditujukan untuk menilai kesiapan dan kelayakan pengkajian. Indikator pengkajian (RPTP) yang layak berdasarkan struktur anggarannya, adalah jika rencana pembelanjaan anggaran baik belanja pegawai, belanja modal maupun belanja operasional dari segi besaran dan proporsinya sesuai kebutuhan.

Hasil monev perencanaan menunjukkan bahwa seluruh kegiatan BBP2TP pada TA. 2006 telah dilengkapi dokumen teknis RPTP, RDHP, TOR/RKOT, ROPP, kuesioner/dokumen kerja, juga dilengkapi dokumen penunjang, seperti SK Kepala Balai Besar Pengkajian, permohonan pelaksanaan dari penanggung jawab dan persetujuan pelaksanaan dari Kuasa Pengguna Anggaran.

Dari 14 judul kegiatan, terdapat empat judul kegiatan yang merupakan bagian dari kegiatan Prima Tani yang menjadi fokus kegiatan utama di BBP2TP yang secara umum meliputi sebagian besar BPTP seluruh Indonesia. Kegiatan Prima Tani sebagai program Badan Litbang Pertanian sekaligus Program Departemen Pertanian, menjadi tolok ukur kinerja BBP2TP sebagai perencana, pelaksana, dan sekaligus penilai keberhasilan pelaksanaannya yang diwujudkan dengan pembentukan Tim Teknis Pusat Prima Tani di BBP2TP.

Khusus untuk kegiatan penunjang dan administrasi kegiatan pelaporan, dilakukan melalui laporan keuangan dan penyerapan dana secara berkala, selain laporan per triwulan serta laporan tengah tahun, sekalipun tidak berjalan sesuai yang direncanakan. Kendalanya terkait dengan tanggung

jawab dan kesadaran dari masing-masing bidang kegiatan untuk melakukan kinerja yang baik melalui evaluasi kegiatan pada masing-masing unit kerja. Sistematis kerja yang cukup padat menyebabkan penanggung jawab kegiatan tidak memungkinkan untuk melaporkan rencana kegiatan dan tingkat capaiannya secara berkala/periodik. Kegiatan monev internal di BBP2TP terutama berkaitan dengan kegiatan struktural (unit kerja) yang ada relatif sulit untuk dilakukan, mengingat sistematis kerja dari masing-masing unit kerja belum terbentuk satu sama lain sebagai suatu model dan sistem yang terstruktur di tingkat internal BBP2TP, sehingga pada pelaksanaannya berjalan masing-masing tanpa adanya kontrol administrasi terutama terhadap penyerapan anggaran dan pelaksanaan dari kegiatan unit kerja yang ada dengan output yang dihasilkan/diperoleh.

Untuk pelaksanaan kegiatan monev internal BBP2TP terutama kegiatan yang tidak terkait dengan pengkajian, perlu dibuat aturan yang cukup ketat sesuai dengan peruntukan dan perencanaan antar bidang selama setahun. Dengan demikian dapat diperoleh satu sistem kinerja BBP2TP yang komprehensif dan dapat menciptakan etos kerja yang kondusif.

Kegiatan monev intern BPTP belum mendapatkan sosialisasi panduan, sehingga pelaksanaan kegiatan dan pelaporannya masih beragam dan mengalami kendala pada saat pembuatan laporan rekapitulasi serta pelaksanaan kegiatan monev internal BPTP setiap tahun mengalami perubahan sehingga tidak tepat waktu.

Dengan mempelajari secara seksama kondisi yang ada dari setiap indikator pada keempat tahapan (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak dari suatu kegiatan), maka dapat dilakukan perbaikan-perbaikan (apabila diperlukan) untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan di BPTP/PTP. Hasil kegiatan monev dalam kurun waktu satu tahun yang dilakukan diakhir tahun, dituangkan dalam LAKIP. Sehingga hasil kegiatan monev tersebut sangat diperlukan untuk mempertajam dan meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan kinerja kegiatan BPTP/PTP pada tahun-tahun mendatang.

Permasalahan dalam perencanaan penyusunan RPTP/RDHP: Inventarisasi dokumen (matrik program, RPTP/RDHP, ROPP dan laporan) belum lengkap dan belum tertib dan Penyusunan RPTP/RDHP belum sesuai dengan panduan yang telah disusun oleh Badan Litbang Pertanian. Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan: Substansi yang umum ditemukan belum sesuai dengan Panduan Umum Litkaji dan Diseminasi Badan Litbang adalah aspek metodologi pengkajian, kesesuaian tujuan dan keluaran dan masih ditemukan adanya kesenjangan antara rencana kegiatan dalam RPTP dengan implementasi di lapangan. Dalam pengolahan data dan

penyusunan laporan hasil pengkajian masih lemah khususnya dalam analisis data, pembahasan dan merumuskan kesimpulan. Analisis usahatani belum tajam, belum membandingkan antara teknologi yang diinovasikan dengan teknologi petani, bahasan terbatas, kesimpulan belum tajam, Pelaporan secara periodik (misalnya bulanan, triwulan, dan tengah tahun) belum dibuat.

BBP2TP pada tahun 2006 secara umum telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, namun masih perlu dilakukan pembenahan dan optimalisasi kinerjanya, khususnya fungsi koordinasi. Beberapa permasalahan yang menyebabkan beberapa fungsi belum berjalan secara optimal antara lain: (a) Terbatasnya kemampuan staf penunjang untuk mendukung tupoksi BBP2TP, (b) Terbatasnya fasilitas pendukung (ruang kerja, komputer, perpustakaan), dan (c) Masa transisi perubahan tupoksi dari Balai (eselon 3) menjadi Balai Besar (eselon 2) membutuhkan waktu untuk melakukan penyesuaian terhadap tupoksi yang baru. Beberapa permasalahan di atas telah dilakukan upaya pembenahan melalui : (a) Penambahan staf baru, (b) Meningkatkan kualitas SDM, (c) Peningkatan ketersediaan fasilitas pendukung (komputer, ruang kerja, jaringan internet, dan perbaikan perpustakaan), dan (d) Masa transisi perubahan tupoksi cukup berjalan satu tahun saja, sehingga tahun 2007 diharapkan semua fungsi pelayanan administrasi dapat berjalan optimal.

Indikator kinerja masukan (input) dilihat dari dua aspek, yaitu dana dan sumberdaya manusia (SDM). Indikator input dana mencapai sekitar 56 sampai 100 persen. Sedangkan indikator input SDM memiliki persentase tingkat capaian lebih dari 90 persen, bahkan hampir 50 persen dari total kegiatan yang dilaksanakan tingkat capaian SDM-nya mencapai 100 persen. Kegiatan BPTP pada dasarnya terdiri dari kegiatan penelitian, pengkajian, diseminasi, dan peningkatan kapabilitas dan memberikan keluaran berkisar antara 90 persen sampai 100 persen. Capaian kinerja hasil menunjukkan tingkat capaian yang bervariasi antara 76 persen sampai 100 persen. Capaian hasil sudah dapat tercatat dan terlaksana secara kuantitatif dengan baik.

Beberapa keberhasilan kinerja yang telah dicapai oleh BPTP/PTP dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pendidikan dan pelatihan SDM (jangka panjang maupun pendek) baik untuk tenaga fungsional peneliti, fungsional penyuluh maupun staf penunjang yang dilakukan secara berkesinambungan serta tersedianya fasilitas serta sarana dan prasana BPTP/PTP seperti fasilitas perkantoran, laboratorium, kebun percobaan, sarana transportasi, komputer, alat audio visual, serta alat komunikasi yang relatif baru dan kondisi yang baik.

Dalam pelaksanaan kegiatannya, BPTP/PTP juga menghadapi berbagai kendala dan permasalahan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kendala dan permasalahan internal adalah belum meratanya jumlah SDM yang sesuai dengan kebutuhan dimana tenaga peneliti dan penyuluh senior belum merata dan tidak seimbang di antara BPTP/PTP sedangkan eksternal berkaitan dengan: (a) Terbatasnya sumber pendanaan dan (b) Masih kurang sinkronnya program litkaji di BPTP/PTP dengan program penelitian di Balit Komoditas. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian berkaitan dengan proses pemanfaatan lebih lanjut dari hasil penelitian/pengkajian yaitu diseminasi teknologi hasil dan jaringan kerjasama BPTP/PTP perlu diperluas.

Perbaikan yang perlu dilakukan adalah: (a) Kebutuhan SDM dengan keahlian tertentu yang belum dimiliki oleh BPTP/PTP selama ini diatasi dengan bantuan tenaga peneliti dari Balit Komoditas, (b) BPTP/PTP secara berkala perlu menginventarisasi teknologi yang dibutuhkan dan komponen teknologi yang telah dihasilkan oleh Balit Komoditas, dan (c) Perlu adanya pembagian tanggung jawab pendanaan (*cost-sharing*) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dengan manfaat hasil litkaji untuk daerah sebagai alternatif solusi dalam penyediaan dana.

Penyusunan Rencana Kerja sama

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 301/Kpts/OT.140/7/2005, tanggal 25 Juli 2005, salah satu tugas dan fungsi Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP) adalah melaksanakan kerja sama dan pendayagunaan hasil pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian. Hal ini terasa semakin penting mengingat selama ini Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebagai lembaga penelitian dan pengembangan telah banyak menghasilkan temuan-temuan berupa teknologi pertanian yang siap terap, namun sebagian besar dari teknologi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh pengguna atau mitra kerja sama.

Di sisi lain, walaupun telah ada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Kerja sama Dalam Negeri yang disusun oleh Badan Litbang Pertanian No.KL.010.50.2000 tanggal 31 Juli 2000, namun belum seluruh UK/UPT di daerah mempunyai pemahaman yang sama tentang kewajiban dalam melakukan alih teknologi serta hak untuk menggunakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Sehingga dipandang perlu adanya suatu penyempurnaan acuan dan pedoman yang baku bagi semua BPTP dan mitra kerja samanya. Acuan ini lebih bersifat pedoman-pedoman pokok

dan didasari atas pengalaman kerja sama selama ini, dan harus juga diingat karena setiap BPTP memiliki kekhasan masing-masing, maka berbagai modifikasi dan penyesuaian sangat dianjurkan untuk dilakukan sesuai dengan kondisi setempat dan perkembangan masalah yang ada.

Badan Litbang Pertanian, dalam rangka penyusunan penyempurnaan Pedoman Umum Kerja sama Badan Litbang Pertanian, sangat mengharapkan adanya masukan atau umpan balik dari BBP2TP termasuk seluruh BPTP. Diharapkan dengan adanya umpan balik dalam penyusunan acuan kerja sama ini makin mempermudah berbagai pihak yang akan melaksanakan proses alih teknologi dan kerja sama yang saling menguntungkan dengan pihak ketiga.

Beberapa pendekatan dalam kegiatan ini dilakukan berdasarkan tujuan yang akan dicapai, antara lain: (a) Identifikasi dan inventarisasi kegiatan kerja sama BPTP dilakukan dengan menggunakan format yang sama untuk seluruh BPTP, dengan rentang waktu lima tahun terakhir (tahun 2000 – 2005), (b) Menjalinkan kerja sama pengkajian dengan *stakeholders* dalam dan luar negeri; dilaksanakan melalui pendekatan institusional maupun pendekatan pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti yang berkompeten di bidangnya. Untuk seterusnya melalui proses administrasi dan pelaksanaan teknis sesuai dengan prosedur Balai, (c) Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi (monev) kerja sama pengkajian di seluruh BPTP, dengan menyusun *form* monitoring baik berupa rekapitulasi kegiatan kerja sama maupun *form* laporan tengah tahun kegiatan kerja sama yang dilaksanakan oleh masing-masing BPTP, dan (d) Menjaring masukan bagi penyempurnaan Juklak Kerja sama melalui diskusi di beberapa BPTP, yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan monev kerja sama.

Waktu pelaksanaan kegiatan ini mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2006. Sedangkan lokasi yang terpilih mewakili wilayah masing-masing adalah sebagai berikut: Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah), Sumatra (Sumatra Utara, Sumatra Barat dan Lampung), Bali, Sulawesi (Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara), dan Kalimantan (Kalimantan Tengah).

Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa secara umum pengembangan jaringan kerja sama yang dilaksanakan oleh BPTP dengan pihak lain (*stakeholders*), masih perlu diperbaiki terutama dalam hal pengaturan tata tertib kerjasama. Masih beragam persepsi di daerah (BPTP) dalam menterjemahkan Juklak Kerjasama yang diterbitkan oleh Badan Litbang Pertanian. Beberapa upaya Badan Litbang Pertanian dalam peningkatan kinerja BPTP, terkait dengan pengembangan jaringan kerja sama ke depan dapat dilakukan melalui:

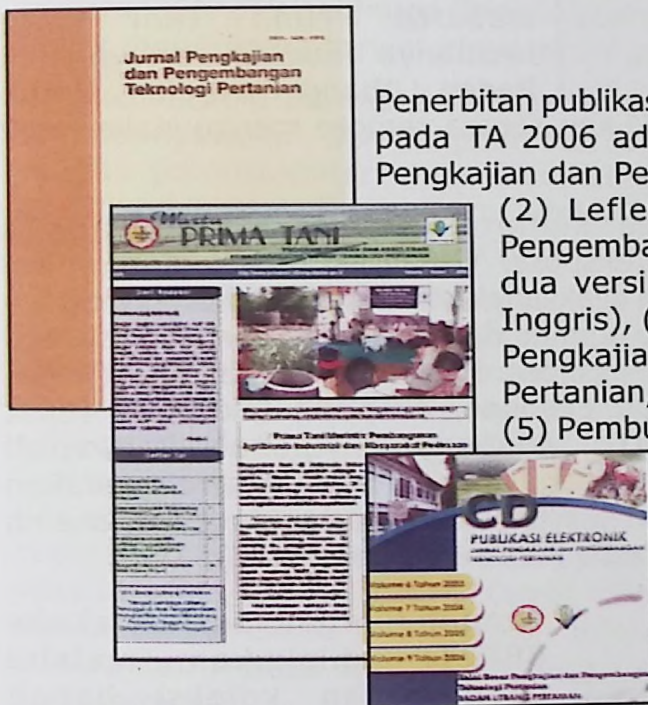
- a. Pengaturan kerja sama, baik dalam negeri maupun luar negeri, dalam bentuk penerbitan buku Petunjuk Pelaksanaan Kerja sama Badan Litbang Pertanian, pada tahun 2000 dan telah direvisi pada tahun 2006. Buku ini antara lain berisi bentuk kerja sama (baik penelitian, pengkajian, dan diseminasi), aturan kerja sama, ruang lingkup (dalam dan luar negeri), syarat dan tatacara pelaksanaan, serta pengaturan hasil kerja sama. Pedoman kerja sama ini bersifat umum (*general*) untuk memberi keleluasaan kepada BPTP dalam menjalin kerja sama dengan pihak-pihak yang telah ditetapkan dalam juklak.
- b. Mendorong BPTP dalam peningkatan jalinan kerja sama dengan Pemda dan dinas terkait lainnya di daerah. Hal ini sangat dirasakan terutama saat implementasi kegiatan Klinik Teknologi Pertanian dan Prima Tani.
- c. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya, terutama terkait dengan pemanfaatan Laboratorium dan Kebun Percobaan sebagai aset BPTP, dengan tetap mengedepankan independensi dan kaidah ilmiah.
- d. Peningkatan jaringan informasi, komunikasi, dan diseminasi, serta penjaringan umpan balik ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).
- e. Peningkatan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian (monitoring dan evaluasi). Dalam hal ini BBP2TP diberi tanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas tersebut.

Pengembangan Informasi, Komunikasi, dan Diseminasi Teknologi Pertanian

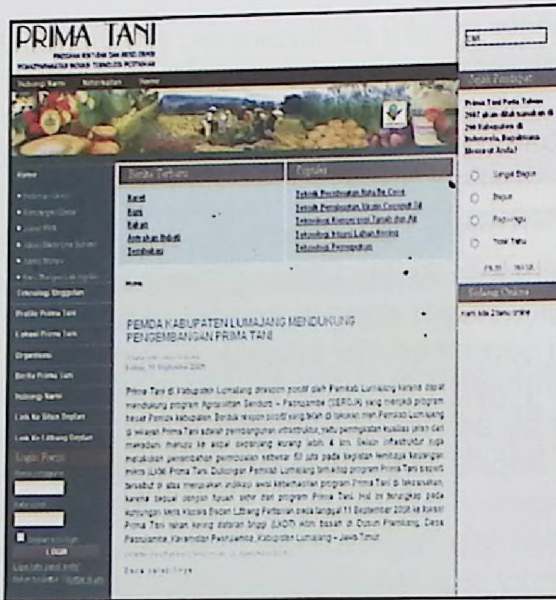
Perkembangan teknologi di bidang informasi, khususnya dengan media telekomunikasi dan komputer merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mengkomunikasikan informasi teknologi dan kebijakan untuk kemajuan pembangunan pertanian. Pemanfaatan teknologi ini memberikan peluang besar bagi setiap orang untuk mengakses berbagai sumber informasi secara cepat, bebas hambatan, relatif murah, dan mudah. Melalui media tercetak BBP2TP dapat menginformasikan bahan pengembangan pertanian kepada pengguna, sedangkan melalui forum media ekspose dan pameran audien/pengguna informasi dapat secara langsung berkomunikasi tentang permasalahan pertanian, khususnya yang terkait dengan teknologi. Penyelenggaraan berbagai kegiatan ini secara tidak langsung akan memberikan nilai tambah pada inovasi hasil-hasil penelitian dan pengkajian dengan penerapan/adopsinya oleh pengguna. Untuk perlu adanya penyelenggaraan fungsi sistim informasi, komunikasi dan diseminasi teknologi pertanian yang tujuannya untuk mendapatkan, mengelola dan

mengembangkan berbagai bentuk media melalui perancangan, pembuatan, penyajian dan pelaksanaan: penyusunan dan penerbitan media informasi tercetak, pengembangan jaringan LAN dan Website, partisipasi dalam seminar nasional/pameran/ekspose/visualisasi teknologi/informasi pertanian, serta pengelolaan perpustakaan BBP2TP.

Kegiatan ini memiliki sasaran utama 30 BPTP, calon BPTP di provinsi baru, Balit, Balai Besar dan Puslitbang di lingkup Badan Litbang Pertanian serta Pemda. Materi disesuaikan atau dipilih sesuai dengan kondisi aktual yang juga merupakan informasi/teknologi yang memiliki kriteria unggulan atau potensial atau prospektif. Pengumpulan bahan pada prinsipnya akan dilakukan melalui para peneliti yang berada di BBP2TP dan BPTP. Khusus untuk BPTP akan dilakukan melalui Kepala Seksi Pelayanan Teknik.



Penerbitan publikasi tercetak yang telah dilaksanakan pada TA 2006 adalah sebagai berikut: (1) Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, (2) Leflet Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian dalam dua versi (bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), (3) Rencana Strategis Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, (4) Penerbitan Warta Prima Tani, (5) Pembuatan poster dikhususkan sebagai bahan display pameran, dan (6) Publikasi dalam bentuk CD interaktif akan memuat dokumentasi tentang naskah artikel JPPTP.



proses updatingsnya dapat dilakukan secara remote menggunakan *software Win Scp*.

Terkait dengan pengembangan dan pemanfaatan sistim informasi dan teknologi informasi, BBP2TP mengelola jaringan LAN yang yang dioperasikan terpadu dengan jaringan *cyber* cimanggung yang tersambung dengan 6 UPT/UK Litbang di Kampus Penelitian Cimanggung (kecuali Puslitbang Tanaman Pangan) menggunakan sistim jaringan *fiber optic*. Selain itu BBP2TP mengelola *website* BBP2TP dan *website* Prima Tani yang keduanya *hosting servemnya* di Badan Litbang Pertanian. Untuk



Beberapa kegiatan/ event dalam rangka pameran/ekspose/ visualisasi teknologi/informasi pertanian dilaksanakan melalui: pameran/ekspose mengikuti agenda Badan Litbang Pertanian seperti pameran/ekspose Hari Pangan Sedunia (HPS), Agro Food ekspose, ekspose Teknologi Tepat Guna (TTG), Jambore Penyuluhan, Partisipasi dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan BPTP, dan Siaran Radio Pertanian bekerjasama dengan Radio Pertanian Ciawi (RPC).



Pengembangan perpustakaan BBP2TP dilakukan melalui membenahan koleksi bahan pustaka dengan pembukuan dan penomoran sesuai katalog pustaka, serta entry data menggunakan *Win Isis*.

Kendala yang dihadapi saat ini, BBP2TP belum memiliki staf yang berkompeten serta fasilitas untuk pengelolaan teknologi informasi khususnya untuk jaringan

informasi berbasis web dan perancangan multimedia sistem komputerisasi. Ketersediaan peralatan, sumberdaya dan dukungan manajemen sangat diperlukan dalam rangka kelancaran dan keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan. Seiring dengan semakin besarnya tanggung jawab BBP2TP terutama terkait dengan koordinasi kegiatan BPTP maupun Prima Tani, kegiatan informasi, komunikasi dan diseminasi teknologi pertanian akan menjadi lebih besar karena menjadi salah satu fungsi yang diselenggarakan BBP2TP.

Pengembangan Database dan Jaringan SIM dan SAP

Pengembangan data base dan jaringan SIM dan SAP adalah salah satu kegiatan BBP2TP, sehingga dengan adanya kegiatan ini membantu BBP2TP untuk mendukung terwujudnya *good governance*.

Kegiatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang dilakukan BBP2TP yaitu SIM Kepegawaian, SIM Program dan SIM Monitoring dan Evaluasi. Dalam rangka pemutakhiran data dan kelengkapan data, tim SIM BBP2TP mengikuti beberapa kegiatan workshop yang diadakan Badan Litbang Pertanian dan melakukan pembinaan ke BPTP.

Pada TA 2006, Tim SIM Kepegawaian mengadakan Apresiasi SIMPEG di Wonocolo, Jawa Timur. Adapun output dari kegiatan ini diharapkan semua operator SIMPEG: (1) Lebih memahami dan menguasai baik secara teori dan teknis pengoperasian program SIMPEG Versi Windows sebagai dasar penyusunan laporan kepegawaian, (2) Memahami konsep penyajian data laporan kepegawaian sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan dan surat keputusan Menteri Pertanian, (3) Dapat menyajikan data dengan cepat dan akurat jika diminta oleh pengambil kebijakan baik secara berkala atau sewaktu-waktu, dan (4) Dapat menghimpun, menyimpan, merekam, dan merawat serta memberikan informasi seputar data kepegawaian antara lain: data mutasi kepegawaian, data fungsional, dan lain sebagainya.

Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan sedangkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga. Untuk kegiatan SAI di BBP2TP, selain mengikuti workshop yang diadakan Badan Litbang Pertanian, Tim SAI BBP2TP juga mengadakan Apresiasi SAI di Yogyakarta untuk persiapan penyusunan laporan keuangan semester I. Adapun output dari kegiatan ini adalah: (1) Dapat memahami Standar Akuntansi Pemerintah sebagai dasar Penyusunan Laporan keuangan, (2) Dapat memahami konsep penyajian laporan keuangan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Standar

Akuntansi Pemerintah maupun Peraturan dan ketentuan lainnya, (3) Dapat memahami struktur dan isi penyajian laporan keuangan, (4) Dapat memahami input data untuk Laporan Realisasi Anggaran, (5) Dapat memahami input data untuk Neraca, (6) Dapat memahami Keluaran yang dihasilkan oleh Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA), serta (7) Dapat memahami Keluaran yang dihasilkan oleh Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (SAKPB)

Pemanfaatan data SIM dan SAP sebenarnya untuk mempermudah dan memperlancar arus informasi secara cepat serta dapat untuk pengambilan keputusan/kebijakan pimpinan. Sehingga diharapkan untuk tahun 2007 BBP2TP mempunyai dana untuk dapat membina BPTP dalam hal pemutakhiran data SIM dan SAP. Hal ini disebabkan program SIM dan SAP setiap tahunnya mengalami perubahan-perubahan.

7.2. Kegiatan Pengkajian

Kajian Peluang Pembangunan Pertanian di Kabupaten Merauke – Papua

Kabupaten Merauke mempunyai potensi alam dan ekonomi yang besar untuk dikembangkan, khususnya pada sektor pertanian. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, khususnya sarana transportasi dan telekomunikasi, menyebabkan program pengembangan Kabupaten Merauke belum dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dan peluang pembangunan pertanian Kabupaten Merauke. Kebijakan pemerintah yang menjadikan Merauke sebagai lumbung pangan kawasan timur diharapkan mampu mendorong pembangunan sektor pertanian.

Namun untuk mewujudkan Kabupaten Merauke menjadi salah satu lumbung pangan nasional (beras), khususnya untuk Kawasan Timur Indonesia masih mengalami berbagai kendala/masalah, antara lain :

1. Aspek Ekonomi: modal petani lemah dan ketersediaan kredit terbatas; penyediaan sarana produksi belum lancar, sulitnya pemasaran hasil pertanian, sehingga produk pertanian (beras) tidak tertampung serta harga jual rendah. Hal tersebut menyebabkan pengembangan sektor pertanian menjadi lambat, dan kesejahteraan petani masih rendah.
2. Aspek Sosial: jumlah tenaga kerja terbatas dan belum berjalannya mekanisme pertanian.

3. Aspek Budaya: bercocok tanam padi bukan budaya penduduk setempat. Penduduk pribumi tidak biasa dan belum berminat menanam padi, sehingga dikhawatirkan pengembangan padi hanya diperuntukkan warga transmigran luar Merauke.
4. Infrastruktur kurang memadai, antara lain masih kurangnya sarana transportasi darat, sungai, dan laut. Komoditas-komoditas baik dari sektor tanaman pangan dan hortikultura, sektor perkebunan, sektor peternakan, dan lain-lain produknya sulit dipasarkan karena mahal biaya transportasi.

Berdasarkan pewilayahan komoditas pertanian unggulan, kesesuaian pengembangan komoditas pertanian di Merauke, adalah :

a. Pertanian Lahan Basah

Pertanian lahan basah memiliki potensi dikembangkan yang mencakup areal seluas 138.292 ha (25,94%), berupa persawahan untuk pengembangan padi sawah dan jagung. Wilayah pengembangan pertanian lahan basah ini dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu: (1) Wilayah yang sesuai untuk pengembangan komoditas padi sawah, seluas 60.914 ha (11,43%) dan (2) Wilayah pengembangan komoditas tanaman pangan lahan basah berupa padi sawah dan jagung, seluas 77.378 ha (14,51 %).

b. Pertanian Lahan Kering, Tanaman Pangan

Potensi pengembangan pertanian lahan kering, tanaman pangan mencakup areal seluas 25.763 ha (4,83 %). Komoditas pertanian yang disarankan berupa komoditas tanaman pangan. Pembudidayaan komoditas dapat secara tumpangsari atau monokultur. Jenis komoditas yang dapat diusahakan antara lain: jagung, padi gogo, dan ubi kayu mencakup areal seluas 18.872 ha (3,54%) atau untuk komoditas tanaman pangan lainnya, berupa: kacang tanah, jagung, dan kedelai, mencakup areal seluas 6.891 ha (1,29%).

c. Pertanian Lahan Kering, Tanaman Pangan/Perkebunan/Hortikultura

Pertanian lahan kering, tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura, mencakup areal seluas 60.041 ha (11,26%). Pembudidayaan tanaman dapat dilakukan secara tumpangsari atau monokultur. Jenis komoditas yang diusahakan antara lain: (1) Komoditas tanaman pangan yaitu: jagung, padi gogo, ubi kayu, (2) Komoditas perkebunan yaitu: kelapa sawit, dan komoditas hortikultura berupa: rambutan, mencakup areal seluas 16.213 ha (3,04%) dan untuk komoditas tanaman pangan: kacang tanah, jagung, dan kedelai, komoditas perkebunan berupa:

kelapa sawit, dan komoditas hortikultura berupa: rambutan, mencakup areal seluas 43.828 ha (8,22%).

d. Hutan Lahan Basah

Lahan-lahan yang disarankan sebagai hutan lahan basah, terdiri dari lahan yang secara fisik harus dijadikan sebagai kawasan konservasi dan lahan berstatus sebagai kawasan hutan yang diperuntukan sebagai kawasan penyangga, seluas 68.133 ha (12,78%).

e. Hutan Lahan Kering

Lahan-lahan yang disarankan sebagai hutan lahan kering, terdiri dari lahan yang secara fisik harus dijadikan sebagai kawasan konservasi dan lahan-lahan berstatus sebagai kawasan hutan yang diperuntukan sebagai kawasan penyangga seluas 15.718 ha (2,95%).

Secara keseluruhan, kesesuaian biofisik lahan untuk pengembangan komoditas padi sawah di Kabupaten Merauke seluas 1.679.616 ha, untuk pengembangan padi gogo dan tanaman pangan/tanaman musiman lainnya seluas 1.775.426 ha. Luas sawah yang sudah ada hingga tahun 2002 adalah 21.698 ha dan lahan kering tanaman setahun 27.726 ha. Seluas 28.260 ha sudah memiliki sistem pengairan tersebar di Kecamatan Merauke dan Kurik. Dengan demikian, persentase pemanfaatan lahan potensial tersebut baru 1,31%.

Melihat kondisi pertanian yang saat ini ada di Merauke dan potensi yang ada, nampaknya perlu program pembangunan pertanian yang menyeluruh untuk meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya dan mengatasi masalah yang ada. Beberapa program pembangunan yang strategis untuk dilaksanakan adalah:

1. Program Pengembangan Infrastruktur

Pembangunan infrastuktur pertanian, seperti jaringan irigasi, pembuatan dan pembangunan jalan-jalan penghubung di sentra produksi pertanian dan ke pasar. Hal ini bermanfaat untuk: (1) Meningkatkan produksi pertanian, (2) Memperlancar ketersediaan sarana produksi (benih, pupuk dan pestisida dsb.), (3) Memperlancar pemasaran hasil pertanian, dan (4) Memudahkan penyuluhan pertanian, akses terhadap informasi harga dan teknologi

2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas SDM pertanian dilakukan melalui pelatihan dan penyuluhan. Peningkatan kualitas SDM diarahkan menuju

pemberdayaan petani serta kelembagaan pertanian dan pedesaan secara partisipatif.

3. Program Pengembangan Sosial Budaya dan Kelembagaan

Program ini merupakan pemberdayaan modal sosial dalam pembangunan pertanian. Dalam pengembangan kelembagaan, rekayasa kelembagaan diperlukan untuk pemberdayaan petani dan kelembagaan pertanian dan pedesaan.

4. Program Introduksi Teknologi Usahatani, Mekanisasi, Pasca Panen, dan Pengolahan Tepat Guna

Inovasi teknologi usahatani (pengolahan tanah, pemupukan, dll), sistem usahatani (PTT, ISPT, dll), mekanisasi, dan lain-lain perlu terus didorong untuk diterapkan, agar produk pertanian lebih bernilai ekonomis dan berdaya simpan cukup tinggi untuk ketahanan pangan domestik maupun untuk pasar regional.

Pengkajian Inovasi dan Diseminasi Program Prima Tani

Prima Tani merupakan suatu model atau konsep baru diseminasi teknologi yang dipandang dapat mempercepat penyampaian informasi dan penyebaran inovasi teknologi pertanian. Oleh karena itu, Prima Tani dapat dijadikan instrumen rintisan untuk mendapatkan model pembangunan pertanian pedesaan yang komprehensif berbasis inovasi pertanian, sehingga tepatlah kiranya jika Prima Tani juga dijadikan instrumen realisasi RPPK yang dilaksanakan secara partisipatif oleh semua *stakeholder* pembangunan pertanian.

Komponen utama pembaharuan dalam Program Prima Tani adalah inovasi teknis dan inovasi kelembagaan. Dengan introduksi pembaharuan tersebut, diharapkan dapat mendorong kinerja agribisnis di pedesaan sehingga pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas dan pendapatan usahatani, pendapatan rumah tangga, dan perbaikan ekonomi regional pedesaan. Setelah berhasil, langkah berikutnya adalah pemasalan atau diseminasi inovasi untuk memperluas sasaran.

Keberhasilan pencapaian tujuan Prima Tani tentunya akan sangat tergantung pada kinerja inovasi dan diseminasi. Oleh karena itu ada baiknya dilihat bagaimana kinerja inovasi dan diseminasi dalam Prima Tani tersebut, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya.

Landasan penentuan inovasi dalam Prima Tani berpijak pada hasil PRA dan *base line survey* di daerah yang bersangkutan, oleh karena itu jenisnya

beragam tergantung pada kondisi wilayah, sub agroekosistem dan aspirasi petani. Dalam introduksi inovasi ini masing-masing provinsi menetapkan komoditas unggulan, misalnya PTT cabai di Sumatera Barat, PTT padi di Jawa Barat dan Kalimantan Barat. Di Bali mengembangkan integrasi ternak sapi dengan kakao dan usahatani bawang merah dengan dukungan teknologi embung untuk sarana penyiramannya dan di Sulawesi Selatan unggulannya adalah peningkatan produktivitas kakao melalui peremajaan dengan metoda sambung samping.

Secara empiris kinerja inovasi ditentukan antara lain eksistensi inovasi, dukungan informasi inovasi dan partisipasi petani. Dalam hal ini, Prima Tani telah menunjukkan keberhasilannya membawa misi percepatan inovasi sebagaimana terlihat dari tingkat partisipasi petani terhadap inovasi yang relatif besar. Perilaku petani mengadopsi inovasi teknologi tersebut merupakan cerminan dari pengambilan keputusannya yang tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain: (a) Ketersediaan atau dukungan benih/bibit/induk, (b) Tingkat produktivitas, (c) Tingkat kerumitan, (d) Kesesuaian dengan akar budaya setempat, (e) Harga jual produk, (f) Keuntungan, dan (g) Akses pasar.

Diseminasi atau penyebarluasan teknologi pertanian merupakan satu mata rantai yang tidak terpisahkan dalam rangkaian introduksi inovasi Prima Tani. Temuan lapangan menunjukkan bahwa mayoritas petani telah memiliki akses yang baik dalam kegiatan diseminasi ini sejak sebelum Prima Tani.

Bentuk diseminasi yang sudah diketahui mayoritas petani sebelum Prima Tani adalah diseminasi melalui media rekaman (kaset, VCD dan Siaran radio), kursus tani, magang, dan sekolah lapang. Sedangkan jenis diseminasi lainnya mayoritas diketahui setelah Prima Tani. Oleh karena itu diakui Prima Tani telah memperkuat mediasi diseminasi melalui kegiatan pendampingan, kunjungan lapang, percontohan dan pertemuan.

Informasi di atas menunjukkan bahwa Program Prima Tani telah menunjukkan indikasi keberhasilannya, meskipun pada saat penelitian berlangsung baru memasuki pertengahan tahun kedua. Dengan demikian, Program Prima Tani dapat diharapkan menjadi motor penggerak pembangunan pertanian yang berawal dari pedesaan berbasis inovasi pertanian.

Pengkajian Dinamika Indikator Pembangunan Pedesaan di Wilayah Pengembangan Prima Tani

Dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan, salah satu jalan yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan produktivitas usahatani agar menjadi lebih efisien sehingga mampu bersaing di pasaran. Efisiensi dan produktivitas usahatani sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal antara lain harga sarana produksi, upah tenaga kerja, harga produksi pertanian dan harga barang konsumsi. Oleh karena itu, mengetahui perkembangan faktor eksternal tersebut sangat penting dalam menentukan indikator pembangunan ekonomi pedesaan.

Informasi mengenai perubahan-perubahan indikator pembangunan ekonomi pedesaan akan sangat bermanfaat dalam membangun perencanaan dan kebijakan serta penyempurnaan strategi pembangunan di sektor pertanian dan pedesaan yang lebih efektif. Pengkajian dinamika indikator pembangunan pedesaan merupakan alternatif yang dapat menghasilkan masukan yang diperlukan bagi pengambil kebijakan. Untuk itu, pada tahun 2006 telah dilakukan pengkajian di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.

Sub sektor pertanian masih memegang peran cukup penting di berbagai agroekosistem kajian, sebagai komponen dominan dalam pembentukan total pendapatan petani yang ditunjukkan oleh kontribusi sektor pertanian terhadap total pendapatan rumah tangga. Lebih dari 70 persen pendapatan RT petani berasal dari sektor pertanian, dan sisanya kurang dari 30 persen berasal dari sektor non pertanian.

Pada agroekosistem dengan komoditas dominan tanaman semusim (pangan atau hortikultura), total pendapatan petani terutama dibentuk oleh komoditas tersebut ditopang komoditas lain seperti ternak, tanaman tahunan, kegiatan berburuh *off farm* dan *non farm*. Demikian juga pada agroekosistem dengan komoditas utama tanaman tahunan (perkebunan, buah-buahan atau industri), peran sub sektor lainnya juga memegang peran yang cukup penting. Oleh sebab itu, untuk mengetahui perkembangan pendapatan masyarakat pedesaan, indikator yang dapat dipakai disamping *share* dari komoditas utama yang diusahakan, perlu diperhitungkan juga adalah peran komoditas penunjang lainnya diluar komoditas utama tersebut.

Untuk meningkatkan peran komoditas penunjang tersebut dalam pembentukan total pendapatan petani, maka perbaikan teknologi

usahataniya perlu segera dilakukan. Berdasarkan hasil kajian, teknologi usahatani yang perlu dilakukan adalah melalui penggunaan benih unggul, pemupukan baik jenis pupuk anorganik yang digunakan maupun takarannya belum sesuai dengan kaidah pemupukan berimbang.

Umumnya petani yang belum melakukan diversifikasi usaha adalah petani yang hanya mengusahakan tanaman pangan dan palawija dengan indeks pertanaman yang rendah, yaitu dibawah 200 persen per tahun dan Nilai Tukar Subsisten (NTS) usahataniya bernilai kurang dari satu. Artinya usahatani yang diusahakan belum mampu untuk menutupi keperluan total pengeluaran konsumsi primer rumah tangganya. Agar usahataniya mampu menutupi pengeluaran konsumsi, maka diversifikasi usaha seperti peningkatan indeks pertanaman, integrasi dengan komoditas lain serta inovasi teknologi perlu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani.

Di beberapa desa contoh, masih terdapat perbedaan tingkat upah antara tenaga pria dan wanita. Perbedaan tingkat upah tersebut bervariasi antar daerah, perbedaan ini mencapai Rp 1.000 hingga Rp 6.000/HOK. Perbedaan tingkat upah terjadi pada aktivitas pemeliharaan tanaman, walaupun dalam jumlah jam kerja yang relatif sama yaitu rata-rata 8 jam per harinya. Sedangkan bila dilihat dari kapasitas, ketrampilan dan kecepatan berkerja antara tenaga pria dan wanita perbedaannya tidak terlalu signifikan.

Umumnya upah di sektor non pertanian seperti tukang kayu maupun tukang batu, secara absolut nilainya lebih tinggi dibandingkan upah di sektor pertanian, baik pada aktivitas pengolahan tanah maupun pemeliharaan tanaman, perbedaan tersebut dapat mencapai Rp 10.000 hingga Rp 20.000/HOK. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat upah tenaga kerja yang terjadi di sektor pertanian relatif masih murah, sehingga dapat dikatakan belum terlalu berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan total biaya usahatani.

Harga benih padi di tingkat petani berkisar Rp 3.000 hingga Rp 5.000/kg, hampir dua kali lipat dibandingkan dengan harga di tingkat penangkar benih dengan kisaran Rp 2.000 hingga Rp 2.500/kg. Tingginya perbedaan harga disebabkan oleh belum menyebarnya perusahaan atau penangkar benih secara lebih merata di sentra produksi padi. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya biaya transportasi, pergudangan, dan biaya *handling* lainnya. Demikian juga dengan harga pupuk Urea di tingkat petani melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah dengan perbedaan mencapai Rp 500/kg. Kedepan, perlu upaya menekan perbedaan ini melalui perbaikan distribusi dan perencanaan yang matang antara

jumlah yang diperlukan petani dengan jumlah yang harus dipersiapkan untuk mencegah terjadinya kelangkaan pupuk, yang mengakibatkan harga menjadi meningkat.

Harga produksi yang diterima petani khususnya GKP di sentra produksi pada musim panen selalu lebih rendah dibandingkan dengan harga HPP yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp 1.730/kg. Harga gabah di tingkat petani pada musim panen hanya mencapai Rp 1.200 hingga Rp 1.300/kg GKP.

Fluktuasi perkembangan harga beras kualitas medium di desa contoh di Jawa lebih tinggi dibandingkan dengan fluktuasi harga yang terjadi di desa contoh luar Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa di daerah padat penduduk dimana permintaan akan komoditas tersebut tinggi, fluktuasi harga yang terjadi juga semakin lebar dibandingkan daerah dengan potensi permintaan yang tidak begitu tinggi. Sebaliknya, harga beras kualitas medium di luar Jawa relatif lebih mahal dibanding dengan di Jawa.

Pada bulan Oktober-November 2006, yaitu menjelang musim tanam tiba bertepatan saat diberitakan harga beras nasional bergerak naik, terjadi peningkatan harga beras kualitas medium hanya di desa contoh Jabar. Sedangkan di desa contoh lainnya, peningkatan harga beras relatif tidak mencolok, bahkan di beberapa daerah harga beras relatif stabil.

Harga barang konsumsi gula pasir dan telur ayam ras, sepanjang bulan Mei – Desember 2006 mengalami fluktuasi harga namun tidak terlalu mencolok antar desa contoh. Fluktuasi harga lebih disebabkan oleh letak desa contoh terhadap pusat perekonomian. Relatif stabilnya harga barang konsumsi karena efektifnya kebijakan harga yang diterapkan pemerintah pusat maupun daerah melalui penyediaan dan distribusi yang terencana dengan matang.

Implikasi kebijakan dalam perbaikan kinerja pembangunan pertanian ke depan adalah perbaikan prasarana dan sarana transportasi serta dukungan regulasi harga input-output yang berpihak kepada petani. Dalam hal tenaga kerja, untuk mengurangi terjadinya diskriminasi tingkat upah antar jenis kelamin, dapat dilakukan melalui regulasi ketenagakerjaan, misalnya penyesuaian upah minimum regional (UMR). Besar upah yang berlaku diharapkan tidak memandang jenis kelamin pekerja.

Pengkajian Kelembagaan Petani Mendukung Prima Tani

Pengembangan kelembagaan keuangan mikro sangat penting untuk mengatasi petani yang tidak akses terhadap sumber permodalan. Hasil

kajian kelembagaan petani mendukung PRIMA TANI di Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jatim, NTB, dan DI Yogyakarta menunjukkan jenis lembaga pembiayaan petani di lokasi pengkajian cukup beragam. Secara umum dikelompokkan dalam tiga bagian, yaitu: (1) Lembaga pembiayaan koperasi terdiri atas KSP Lestari Mandiri, KSU Karya Terpadu, dan KUD Wiresinge, (2) Lembaga keuangan mikro terdiri atas KAUM-Mandiri, LPP-UMKM, KUM Wanita Tani dan LKM Prima Tani, dan (3) Lembaga kredit BUMN dan ISWI.



Lembaga KSP Lestari Mandiri di Jatim berdiri pada tahun 1989, sebelumnya bernama KSU Citra Lestari dan melayani pedagang pasar di Kecamatan Lawang. Tahun 1999 berganti nama menjadi KSP Lestari Mandiri bersamaan dengan penyaluran dana dari DEPKOPERINDAG (Rp 10 milyar). Tahun 2005, sudah terbentuk 275 kelompok usaha kecil, yang bergerak di sektor usaha non-pertanian (96,4%) dan usaha agribisnis (3,6%).

Lembaga KSU Karya Terpadu berdiri tahun 1993 dalam bentuk LKM dengan anggota awal 122 orang dan seluruhnya merupakan wanita serta berusaha sebagai pedagang bakulan di Desa Larang, Lombok Timur. Dana awal berasal dari simpanan anggota dan suntikan dana dari Belanda sebanyak Rp 3 milyar. Tahun 2006 lembaga menyalurkan kredit Rp 1,1 milyar kepada 529 nasabah dengan usaha di sektor dagang, petani tembakau, sopir, kios, transportasi, konveksi, dan salon.

Lembaga KUD Wiresinge berdiri pada tahun 1998, dana awal (*seed capitals*) berasal dari simpanan pokok anggota sebesar Rp 100 ribu per anggota. Pada tahun 2005, memiliki asset Rp 500 juta yang sebagian berasal dari donatur Dinas Peternakan Lombok Barat (50%). Bidang usaha mencakup unit simpan pinjam, unit pengadaan saprodi, unit kebutuhan rumah tangga, unit alsintan, dan unit peternakan.

Kelompok lembaga kredit mikro merupakan implementasi lembaga keuangan dengan pendekatan *Grameen Bank*, bertujuan meningkatkan pendapatan dan mengembangkan kemandirian usaha. KAUM-Mandiri terletak di Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Dana awal berasal dari BPLM Direktorat Peternakan dengan anggota 20 orang dan bergerak di usaha ternak itik. LPP-UMKM dibentuk atas kerja sama BKPM Kabupaten Tangerang dengan LPPM IPB Bogor tahun 2003 dengan satu unit pelayanan dan dana awal Rp 260 juta. Sedangkan LKM Prima Tani diintroduksikan Tahun 2006 mendukung program Prima Tani di Jawa Timur, dengan dana awal Rp 12 juta berasal dari BPTP Jawa Timur.

peruntukan kredit untuk usaha dagang dan usahatani dimana semua anggota adalah wanita karena pertimbangan waktu dan ketaatan.

Lembaga kredit BUMN di DI Yogyakarta merupakan bantuan permodalan untuk petani dengan dana berasal dari penyisihan 10% dari keuntungan lembaga BUMN, yaitu PUSRI dan TELKOM. Kredit bersifat bergulir selama 2-3 tahun, yang disalurkan untuk usahatani bawang merah, padi, salak pondoh, kentang, dan ternak itik. Selain itu terdapat Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI) yang memberikan pinjaman untuk usahatani bunga *chrisantium*.

Lembaga pembiayaan KSP Lestari Mandiri menetapkan persyaratan agunan (*collateral*) berupa sertifikat tanah atau kendaraan, baik secara individu atau kolektif. Sedangkan KSU Karya Terpadu mewajibkan agunan untuk pinjaman di atas Rp 500 ribu. Suku bunga antara 24% - 36%/tahun. Jumlah plafon kredit antara Rp 1 juta – Rp 30 juta, dengan lama pinjaman 12 bulan. Cara pengembalian kredit KSP Lestari Mandiri secara bulanan, sedangkan KSU Karya Terpadu tergantung jenis kreditnya, yaitu harian, mingguan, atau bulanan. Jenis sanksi yang diterapkan untuk penunggak yaitu penyitaan agunan.

Lembaga KUD Wiresinge tidak menetapkan persyaratan agunan, tetapi cukup menjadi anggota koperasi. Bunga kredit sebesar 30%/tahun, plafon kredit Rp 100 ribu sampai Rp 1 juta dengan lama pinjaman 12 bulan. Sistem pengembalian secara musiman dan tidak menerapkan sanksi, hanya penjadwalan hutang tanpa dikenakan bunga tunggakan.

Lembaga-lembaga kredit mikro menetapkan pengajuan kredit secara berkelompok dan tidak menetapkan persyaratan agunan, hanya melihat kelayakan usaha yang dijalankan dan dinilai ketua kelompok dimana suku bunga disesuaikan dengan jenis usaha. Sistem sanksi dan insentif diterapkan secara fleksibel.

Lembaga BUMN menetapkan pengajuan secara berkelompok, agunan berupa sertifikat tanah, surat kendaraan bermotor atau agunan kolektif. Sementara jenis sanksi adalah penahanan agunan. Sementara lembaga ISWI mensyaratkan pinjaman secara berkelompok, pengembalian sistem bagi hasil, lama pinjaman dan frekuensi pengembalian berdasarkan perkembangan usahanya. Jenis insentif dan sanksi tidak ada.

Lembaga KSP Lestari Mandiri, KSU Karya Terpadu dan KUD Wiresinge mempunyai struktur organisasi lengkap: rapat anggota, pengawas, pengurus, dan beberapa seksi/unit. KSP Lestari mandiri dan KSU Karya Terpadu, masing-masing bagian organisasi sudah dapat berfungsi sesuai

aturan, sedangkan KUD Wiresinge pengambilan keputusan didominasi oleh ketua koperasi.

Dilihat dari struktur organisasi, lembaga-lembaga kredit mikro memiliki susunan organisasi lebih sederhana dan disusun berjenjang. Sedangkan struktur organisasi lembaga BUMN hanya terdiri dari ketua, sekretaris, dan bagian penagihan.

Lembaga pembiayaan koperasi menyediakan produk pinjaman lebih bervariasi, plafon kredit dapat mencukupi kebutuhan petani dan seleksi calon nasabah dilakukan bersama-sama dengan ketua kelompok tani. Namun lokasi kurang strategis sehingga sulit diakses petani dan adanya sanksi penyitaan agunan menyebabkan kekhawatiran untuk meminjam.

Lembaga-lembaga keuangan mikro memberikan pelayanan kredit lebih sederhana, tanpa agunan, lokasi mudah diakses dan dilakukan secara berkelompok. Namun memiliki kelemahan terbatasnya produk pinjaman, plafon kredit kurang mencukupi kebutuhan dan sanksi belum dijalankan sesuai dengan konsep lembaga keuangan yang berkelanjutan.

Petani menginginkan kredit dalam bentuk uang tunai, karena bentuk natura (sarana produksi) sering menimbulkan kerugian, yaitu: (a) Kemungkinan adanya pengurangan kuantitas maupun kualitas saprodi, (b) Keterlambatan penyaluran, dan (c) Ketidaksesuaian antara jenis saprodi yang disalurkan dengan kebutuhan. Melalui kredit tunai, petani dapat mengelola dananya sendiri.

Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyusunan model generik lembaga keuangan mikro, yaitu: (a) Skim kredit dirancang dengan mengakomodasi plafon kredit yang dibutuhkan dari skala kecil hingga skala besar, (b) Skim kredit melayani sub-sistem produksi, pengolahan dan pemasaran, (c) Penyaluran dan pengembalian kredit untuk sub sistem produksi disesuaikan dengan waktu penerimaan usaha, (d) Prosedur pengajuan, penyaluran dan pengembalian kredit dilakukan sesederhana mungkin, (e) Lama pinjaman maksimal 1 tahun atau 2 musim tanam, (f) Skim kredit harus memungkinkan tumbuhnya *capital formation* melalui tabungan petani/kelompok tani, (g) Skim kredit disertai upaya pembinaan dan pengawasan untuk menjaga dan memperbaiki kinerja usaha petani, dan (h) Skim kredit harus mempertimbangkan keberlanjutan lembaga pembiayaan.

Struktur organisasi model koperasi atau LKM dan KUM dapat diadopsi kedua-duanya dengan memperhatikan kondisi daerah dan sasaran pengembangan. Kelompok tani yang sudah maju dan kinerjanya bagus dapat menjadi organisasi koperasi. Salah satu kelebihan organisasi

LKM/KUM adalah adanya petugas lapang sebagai pembina dan pengontrol kinerja usaha yang dijalankan peminjam. Untuk menjaga keberlanjutan dari sisi ketersediaan dana, maka tambahan posisi dalam struktur organisasi adalah bagian marketing atau bagian yang mengurus *linkage/networking* dengan *stakeholder* lain seperti BUMN, Bank, Pemda, atau organisasi profesi.

Lembaga Pembiayaan dapat menerapkan syarat pengajuan secara berkelompok atau perorangan, dalam pengajuan kredit tergantung skim kredit yang ditawarkan, kondisi kelayakan nasabah, dan peluang pengembalian. Sistem agunan perlu dibedakan, seperti: (a) Pinjaman dibawah Rp 2 juta tidak memerlukan agunan, (b) Pinjaman diatas Rp 2 juta diperlukan agunan, dan (c) Bagi peminjam tanpa agunan, dapat menggunakan agunan kolektif dalam kelompok dengan resiko ditanggung bersama (tanggung renteng).

Seleksi calon nasabah perlu dilakukan untuk mengetahui karakteristik nasabah dengan kriteria, antara lain: (a) Pekerjaan utama di bidang pertanian, (b) Memiliki pekerjaan sampingan dengan pendapatan yang teratur, (c) Bertempat tinggal di wilayah layanan lembaga pembiayaan, (d) Mendapat rekomendasi dari ketua kelompok atau tokoh masyarakat/perangkat desa, dan (e) Mengikuti pelatihan kelompok yang diselenggarakan lembaga pembiayaan seperti Latihan Wajib Kumpulan pada LKM *Grameen Bank*.

Kredit disediakan dalam dua jenis, *pertama* bentuk natura, diutamakan bagi calon peminjam dengan lokasi jauh sehingga sulit mendapatkan sarana produksi. *Kedua* bentuk tunai, untuk lokasi yang sudah akses terhadap lembaga input produksi. Biaya administrasi ditetapkan diawal penyaluran pinjaman sebesar persentase tertentu dari pokok pinjaman.

Penyusunan aturan main pengembalian kredit yang sederhana diupayakan untuk memastikan pengembalian kredit yang kontinu. Beberapa sistem pengembalian pinjaman kredit pertanian, yaitu: (a) Pengembalian setelah panen bagi peminjam yang tidak memiliki sumber penghasilan sampingan, (b) Pengembalian mingguan bagi peminjam dengan sumber penghasilan sampingan, dan (c) Pengembalian berkelompok dengan dikoordinir oleh ketua kelompok.

Dalam rangka meningkatkan motivasi pengembalian pinjaman, maka sebaiknya lembaga keuangan menerapkan *reward and punishment*, secara fleksibel sesuai kondisi peminjam.

Analisis Kebijakan Pembangunan Pertanian: *Kajian Cepat Dampak Bencana Alam di Jogjakarta dan Jawa Tengah*

Gempa bumi yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2006 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah (Jateng) sangat mengejutkan Bangsa Indonesia dan memiliki kerusakan hebat terhadap sejumlah aspek kehidupan masyarakat. Hal tersebut diperparah lagi adanya dampak aktivitas gunung berapi berupa awan panas, lahar panas dan semburan abu di beberapa wilayah. Kerusakan yang sangat dirasakan masyarakat adalah kehancuran rumah tinggal mereka dan kehilangan sanak saudara dan famili. Tercatat sedikitnya 6.000 jiwa meninggal dan lebih 90 persen tempat tinggal mereka rata dengan tanah, secara tidak langsung menjadikan trauma yang berkepanjangan, terutama bagi yang ditinggal pergi sanak saudaranya. Dari aspek rehabilitasi kejiwaan memerlukan waktu relatif cukup lama.

Bencana alam tersebut selain telah mengakibatkan banyak korban nyawa manusia dan materi, juga fasilitas umum, dan beberapa gedung pemerintahan, dimana kesemuanya memberikan dampak negatif terhadap aspek pemerintahan, ekonomi dan sosial masyarakat. Pada umumnya wilayah/daerah yang mengalami bencana dengan tingkat kerusakan sangat parah adalah terjadi pada daerah dimana aktivitas perekonomian masyarakat terfokus pada sektor pertanian. Jumlah korban masyarakat/tani yang meninggal sebanyak 2.080 jiwa. Kerusakan aset pertanian, meliputi gudang, lantai jemur, alat pengering lumbung desa modern, saluran irigasi, pertanaman, alat dan mesin pertanian, kandang ternak dan peralatan lainnya yang nilainya cukup signifikan.

Kerusakan akibat bencana alam di daerah pertanian menyebabkan terganggunya usaha dan sistem pertanian, baik langsung maupun tidak langsung. Rusaknya prasarana saluran irigasi primer, sekunder, dan tertier yang mengakibatkan ancaman kekeringan terutama tanaman padi, jagung, dan kacang-kacangan yang ditanam pada bulan April/Mei. Kasus di Kabupaten Bantul sekitar 9.895 ha padi, jagung 360 ha, kedelai dan kacang tanah masing-masing 1.012 ha dan 464 ha, terancam mengalami kekeringan. Semburan abu dan lahar panas menyebabkan pertanaman terutama tanaman sayur-sayuran tertutup abu dan sebahagian terbakar, sedang aspek peternakan akan mengalami kekurangan pakan dan beberapa kasus petani telah menjual ternaknya dengan harga murah.

Dampak yang tidak langsung terhadap sektor pertanian adalah adanya beberapa petani/keluarga petani mengalami musibah berupa luka dan meninggal dunia, rumah-rumah mengalami kerusakan, aktivitas pertanian di

sawah/ladang terganggu, kekurangan tenaga kerja, dan sebahagian aktivitas mereka terfokus pada pembenahan rumah, bukan di sawah atau usaha ekonomi lainnya.

Sebagai bentuk respon dan tanggung jawab kemanusiaan, Badan Litbang Pertanian, menurunkan Tim Kajian Dampak Bencana Alam di DIY dan Jawa Tengah yang beranggotakan multidisiplin ilmu untuk mengevaluasi dampak terhadap sistem pertanian di kedua wilayah tersebut, terutama pada aspek sistem produksi pertanian, sumberdaya lahan dan lingkungan, sarana dan prasarana pertanian, aspek sosial dan ekonomi masyarakat tani. Keluaran dari kajian ini diharapkan beberapa alternatif kebijakan baik tingkat pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam penanggulangan dampak negatif terhadap aktivitas sistem pertanian dan pelaku agribisnis lainnya, guna menunjang pemulihan kehidupan, sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Alternatif kebijakan dalam penanggulangan dampak negatif tersebut meliputi beberapa aspek tahapan yaitu, pra pemulihan terutama dalam hal memotivasi petani untuk kegiatan usahataniya termasuk para penyuluh, kedua, tahap pemulihan, rekonstruksi dan kemandirian petani. Pada tahap pra pemulihan diperlukan pemetaan masalah dan dampak dari gempa yang dihadapi petani, penyelamatan produksi dan aset petani dan penyusunan program, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam menyusun alternatif kebijakan tersebut, perlu diidentifikasi isu-isu penting yang berkaitan dengan beberapa aspek tahapan kebijakan yang telah disampaikan untuk dianalisis lebih lanjut, terutama aspek kondisi masyarakat, tingkat usahatani di lapangan termasuk kondisi peternakan dan agroindustri di tingkat pedesaan, serta penunjang lainnya.

Dalam rangka pengawalan program penanganan bencana (Gempa dan Erupsi Merapi) baik upaya dalam rekonstruksi sarana dan prasarana usaha pertanian maupun dalam mengembalikan motivasi dan gairah usaha petani perlu upaya yang serius dan terintegrasi terutama mengenai penyertaan atau mobilisasi penyuluh dan atau peneliti, yang dilakukan secara terkoordinasi dengan pemerintah daerah terutama dalam koordinasi pelaksanaan dan pendanaan.

Dalam mengatasi dampak gempa dan erupsi Merapi, diperlukan penyiapan dan introduksi teknologi SIAP SALUR hasil Badan Litbang Pertanian untuk membantu penanganan bencana, misalnya: varietas dan atau komoditas yang tahan kekeringan, tanaman umbi-umbian, sistem irigasi hemat air, dan irigasi pompa.

Penanganan dampak bencana alam perlu memperhatikan spektrum jangka panjang, yang terkait dengan peningkatan kemampuan SDM dalam pengelolaan sumberdaya pertanian. Untuk itu, diperlukan upaya meningkatkan keterampilan SDM pertanian melalui pelatihan-pelatihan.

Salah satu aspek yang sangat penting untuk menunjang kelangsungan usaha adalah sumber permodalan, dimana pada umumnya masyarakat yang terkena bencana kehilangan modal usaha. Untuk itu diperlukan upaya memfasilitasi akses permodalan melalui program kredit khusus dalam rangka pemberdayaan petani dan kelembagaan pedesaan.

Penanganan kerusakan prasarana irigasi berupa DAM dan salurannya merupakan masalah yang sangat mendasar, untuk mencukupi kebutuhan air irigasi yang diperlukan dalam pengembangan tanaman pangan dan hortikultura. Upaya ini memerlukan biaya yang mahal, dan dilihat dari tugas dan fungsi merupakan mandat Departemen Pekerjaan Umum, sehingga diperlukan koordinasi dengan Departemen Pekerjaan Umum dalam memperbaiki DAM dan saluran irigasi yang rusak.

Untuk perbaikan saluran tersier yang rusak akibat tertimbun longsor, sekaligus dalam upaya penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat, program padat karya untuk perbaikan saluran irigasi tersier dipandang merupakan program yang tepat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan penghasilan bagi para petani.

Perbaikan DAM dan saluran irigasi disamping memerlukan biaya yang tinggi juga memakan waktu yang cukup lama, untuk itu diperlukan terobosan teknologi penyediaan air irigasi, antara lain dengan introduksi teknologi pengairan dengan pompa sebagai pengganti sementara sumber irigasi dari DAM dan saluran irigasi yang rusak.

Untuk meringankan kerugian petani dan mendorong pemulihan usaha pertanian perlu upaya memberikan kompensasi saprotan (benih dan pupuk) untuk membantu petani yang mengalami kegagalan panen akibat kerusakan fasilitas irigasi, pada musim tanam berikutnya.

Upaya mengembalikan fungsi dan ketersediaan alsintan, lantai jemur, dan penggilingan padi diperlukan upaya menyediakan kompensasi atas kerusakan alsintan (traktor) milik kelompok tani. Kerusakan lantai jemur dapat dikompensasi dengan menyediakan terpal sebagai sarana pengeringan gabah.

Dampak gempa bumi yang paling dirasakan pada sub sektor peternakan adalah robohnya kandang ternak terutama sapi, ayam, dan kambing, yang merupakan sarana yang harus tersedia dalam usaha peternakan. Untuk itu

diperlukan kompensasi untuk renovasi kandang ternak yang rusak/robok secara berkelompok, disertai penumbuhan kelembagaan kelompok peternak.

Pada aspek tanah, air dan lingkungan, perubahan sumber air merupakan fenomena yang menonjol, dimana terdapat sumber air baru yang muncul di Kabupaten Gunung Kidul dan Bantul. Untuk pemanfaatan sumber air tersebut diperlukan penelitian lebih lanjut terhadap potensi pemanfaatan mata air baru terkait dengan debit, stabilitas dan kualitas air.

Dampak erupsi Merapi pada tanaman hortikultura adalah tertutupnya tanaman oleh abu vulkanik, yang beragam sesuai dengan ketebalan lampiran. Pada tanaman yang dipanen daun atau bunga, tutupan abu ini menyebabkan kegagalan panen atau penurunan produksi atau tidak diterimanya produk di pasar karena tercemar. Konsentrasi usahatani yang terkena dampak berada di Kabupaten Boyolali, Klaten, dan Magelang. Untuk meringankan kerugian dan membantu petani dalam usaha selanjutnya diperlukan penggantian biaya tunai usahatani yang sudah dikeluarkan petani (*at cost*) oleh petani pada usahatani (pangan dan hortikultura) yang mengalami kegagalan dan bantuan benih serta sarana produksi lainnya untuk penanaman berikutnya.

Sebagai upaya mengurangi risiko pada musim tanam selanjutnya, mengingat aktivitas Merapi sulit untuk diduga kapan berakhirnya, masyarakat sebaiknya diarahkan untuk menanam komoditas hortikultura yang produknya berupa umbi, sehingga dampak tertutupnya daun oleh abu vulkanik dapat diperkecil.

Pada sub sektor peternakan, dampak erupsi Merapi yang dirasakan adalah kurangnya ketersediaan hijauan ternak akibat rumput dan daun-daunan tertutup abu, dan berkurangnya pasokan air untuk ternak (terutama sapi perah) karena rusaknya pipa air (di Kabupaten Sleman). Upaya yang dapat dilakukan adalah fasilitasi transportasi untuk mobilisasi peternak dalam mendapatkan pakan dari luar daerah dan bantuan penanaman (bibit dan sarana produksi) hijauan pakan ternak sesuai erupsi Merapi.

Alternatif lain adalah dengan memberikan bantuan pembuatan kandang komunal, pemberian pakan konsentrat, dan bantuan penanganan kesehatan hewan (abu vulkanik berdampak pada kesehatan hewan) terutama di Kabupaten Sleman, Magelang, Boyolali, dan Klaten.

Untuk mengatasi masalah ketersediaan air perlu upaya perbaikan pipa air, namun dalam jangka pendek upaya yang dapat dilakukan adalah pemberian bantuan pengadaan air dari luar untuk pemenuhan kebutuhan

sapi perah dan pembuatan sumur bor pada daerah yang memungkinkan, terutama di Kabupaten Sleman, Boyolali, Klaten, dan Magelang.

Komoditas perkebunan yang paling parah terkena dampak Merapi adalah tembakau. Komoditas lainnya seperti cengkeh dan kopi tergantung fase tanaman. Jika pada saat pembungaan maka diperkirakan akan mengalami kegagalan. Untuk itu upaya yang dapat dilakukan adalah: penggantian biaya tunai usahatani yang sudah dikeluarkan petani (*at cost*) oleh petani pada usahatani tembakau dan bantuan benih serta sarana produksi lainnya untuk penanaman berikutnya di Kabupaten Klaten, Boyolali, dan Magelang.

Kegiatan padat karya terutama untuk rehabilitasi sarana pertanian (antara lain sarana irigasi dan sumur bor) dan usahatani serta mendorong diversifikasi usaha rumahtangga, di Kabupaten Magelang, Klaten, Boyolali, dan Sleman.

Upaya mengatasi dampak erupsi Merapi pada sumberdaya tanah, air, dan lingkungan adalah dengan memberikan penyuluhan pentingnya pengolahan tanah secara sempurna (korporasi) dengan memperhatikan konservasi lahan untuk mengatasi tutupan abu vulkanik.

Berkoordinasi dengan Departemen Kehutanan dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan rehabilitasi areal kehutanan yang rusak akibat terkena luncuran lahar dan awan panas agar fungsi hidrologis hutan bisa pulih

Rehabilitasi sumber air dan perbaikan saluran air minum dengan koordinasi dengan Departemen Pekerjaan Umum dan Pemerintah Daerah terutama di Kabupaten Sleman.

Koordinasi dengan Departemen Pekerjaan Umum dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan Sabo/tanggul penahan/pengalihan aliran lahar dingin di Kabupaten Sleman.

Lampiran 1. Realisasi DIPA Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian TA. 2006

Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Anggaran Dalam DIPA (Rp.-)	Target dalam DIPA	% Bobot	Realisasi Fisik	% Realisasi Individu Terhadap DIPA	% Realisasi Tertimbang terhadap DIPA
1503 . Program Pengembangan Agribisnis							
0001. Administrasi Umum	RM	1.668.997.000*)	12 bln, 744Ob, 576 Ch, 70 peg	35.77	100	113.03	40.43
0013. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional	RM	2.000.000	4 Ot	0.04	100	25	0.01
0024 Pengadaan Makanan/Minuman	RM	56.000.000	14000 Oh	1.2	100	100	1.2
0026. Poliklinik/Obat-obatan+dokter	RM	21.000.000	12 Ob, 12 bln	0.45	100	96.22	0.43
0032 Pengadaan Pakaian Dinas	RM	12.250.000	70 OT	0.26	100	100	0.26
0098. Retribusi Listrik Telp. Gas dan Air	RM	130.360.000	12 bln	2.79	100	99.69	2.79
0167. Pembangunan Prasarana dan Sarana Lingkungan Gedung	RM	37.800.000	80 m2	0.81	100	89.42	0.72
0205 Perawatan Gedung Kantor	RM	57.395.000	985m2 4137 m2 34 unit. 5 pkt, 32	1.23	100	99.76	1.23
0256. Perbaikan Peralatan Kantor dan Sarana Gedung	RM	26.925.000	ttk. 8 line	0.58	100	95.57	0.53
0272. Pengadaan Perlengkapan Gedung	RM	36.010.000	25 unit	0.77	100	96.58	0.75
0277 Pengadaan Alat Pengolah Data	RM	102.500.000	12 unit	2.2	100	99.22	2.18
0323. Teknologi Pengembangan Agribisnis Pertanian terpadu			4 keg				
a. Pengkajian Inovasi & Diseminasi Program Prima Tani	RM	267.617.000		5.74	100	97.43	5.59
b. Pengkajian Dinamika Indikator Pemb. Pedesaan di Wtl. Prima Tani	RM	233.960.000		5.01	100	97.81	4.9
c. Pengkajian Kelembagaan Petani Mendukung Program Prima Tani	RM	195.795.000		4.2	100	97.82	4.11
d. Kajian Peluang Pembangunan Pertanian di Kab. Merauke - Papua	RM	110.000.000		2.36	100	84.5	1.99
0465. Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	RM	244.220.000	1 keg	5.23	100	94.89	4.97
0470 Pengembangan Sumberdaya Informasi IPTEK. Desiminasi dan Jajangan Umpan balik			3 keg				
a. Pengembangan Informasi, Komunikasi & Diseminasi Tekn. Pertanian	RM	439.393.000		9.42	100	78.55	7.4
b. Pendampingan, Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Prima Tani	RM	785.610.000		16.84	100	99.03	16.67
c. Penyusunan Kerjasama Pengkajian	RM	179.561.000		3.85	100	89.75	3.45
1435. Pengkajian dan Desiminasi Teknologi Spesifik Lokasi	RM	51.827.000	1 keg	1.11	100	99.51	1.11
0029. Pengembangan Administrasi Pengelolaan Kepegawaran	RM	6.555.000	1 pkt	0.14	100		
Jumlah Program 1503		4.665.775.000		100	100	100.74	100.74

Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Anggaran Dalam DIPA (Rp.-)	Target dalam DIPA	% Bobot	Realisasi Fisik	% Realisasi Individu Terhadap DIPA	% Realisasi Tertimbang terhadap DIPA
1504 . Program Peningkatan Ketahanan Pangan							
0001. Administrasi Umum	RM	186.678.000	12 bulan	9.06	100	93.82	8.5
0051. Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program			4 keg				
a. Penyusunan Program	RM	284.808.000		13.82	100	99.93	13.81
b. Pengembangan database&jaringan SIM dan SAP	RM	303.141.000		14.71	100	99.12	14.58
c. Peningkatan Kapabilitas Pengkajian&Diseminasi Teknologi Pertanian	RM	555.253.000		26.94	100	95.38	25.7
d. Optimalisasi&Pemanfaatan Sumberdaya BPTP	RM	247.900.000		12.03	100	97.54	11.73
0084. Evaluasi,Laporan Kegiatan	RM	284.860.000	1 keg	13.82	100	98.14	13.56
0250. Perawatan Alat Besar,Bantu	RM	61.600.000	29 unit	3	100	99.82	2.99
0273. Pengadaan meubelair	RM	103.000.000	32 unit	5	100	99.16	4.96
0287. Pengadaan Alat Studio & Komunikasi	RM	1.857.5000	13 unit	0.9	100	95.29	0.66
0924. Rintisan Pendidikan dan Pelatihan	RM	15.000.000	15 OT	0.73	100	100	0.73
Jumlah Program 1504		2.061.015.000			100	97.41	97.41
Jumlah Program 1503+1504		6.726.790.000					

*) Realisasi Administrasi (Belanja Pegawai/Gaji PNS) melebihi pagu



145/D/BBP2TP/2011

631.1

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

Jl. Tentara Pelajar No. 10 Bogor 16114

Telp. 62-251 351277 Fax. 62-251 350928

<http://www.bb2tp.litbang.deptan.go.id>

E-mail : bp2tp@litbang.deptan.go.id, bp2tp@yahoo.com